

## Bab II

### PetroChina on The Move

Pada bab 2, saya menjelaskan tentang profil dari *PetroChina Company Ltd*, beserta dengan sejarah pembentukannya, kebijakan-kebijakan perusahaan yang signifikan dalam mencapai prestasi sebagai salah satu perusahaan multinasional. Pemaparan tentang strategi pengembangan PetroChina, pengembangan aset perusahaan, kemampuan pemasaran, investasi dan reformasi manajemen yang dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah China untuk mencapai tujuan PetroChina sebagai perusahaan minyak multinasional yang memiliki daya saing tinggi.

Pada bagian kedua dari bab ini, akan dipaparkan profil dan sejarah masuknya *PetroChina Company Ltd* melalui bendera PetroChina Indonesia ke sektor industri migas di Indonesia. Penjelasan tentang investasi yang dilakukan oleh PetroChina Indonesia di tiga blok yaitu blok Jabung & Bangko, blok Tuban dan blok Salawati. Serta pencapaian yang telah dilakukan PetroChina Indonesia di ketiga blok tersebut. Penjelasan akan profil PetroChina Company Ltd ditujukan untuk memberikan dasar kuat akan konsep *firm-specific advantages* (FSA) milik Rugman. FSA yang berupa kebijakan perusahaan, kemampuan pemasaran, investasi dan reformasi manajemen.

#### II.I PetroChina di dunia

*PetroChina Company Limited* merupakan perusahaan (produsen) dan distributor minyak dan gas terbesar di China, dan memegang peranan penting dalam industri minyak dan gas di China. Tidak hanya di China, PetroChina salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. PetroChina terbentuk sebagai “*joint stock company*” dengan pertanggungjawaban terbatas oleh China National Petroleum Corporation (CNPC) di bawah UU perusahaan tentang peraturan khusus pendaftaran dan penawaran saham oleh “*joint stock company*”, secara resmi PetroChina terbentuk pada 5 November 1999<sup>53</sup>. Saat ini *PetroChina*

<sup>53</sup> [www.PetroChina.cn/companyprofile/history](http://www.PetroChina.cn/companyprofile/history). diakses 2 Juni 2009

*Company Ltd* dipimpin oleh Jiang Jiemin sebagai Chairman of the Board, Zhou Jiping sebagai Vice Chairman dan Presiden PetroChina Company Ltd dan dibantu oleh Liao Yongyuan sebagai Executive Director. Berikut adalah logo dari PetroChina Company Ltd

Gambar. 2.1



Sumber : [www.Petrochina.cn](http://www.Petrochina.cn)

Latar belakang pendirian PetroChina karena kebijakan reformasi ekonomi China dan meningkatnya permintaan energi yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 9,3% di dekade 90-an. The James A. Baker III Institute for Public Policy dalam penelitiannya tentang MNC China terutama *National Oil Company* (NOC) memberikan pemaparan alasan pendirian PetroChina oleh pemerintah China :

1. Pemerintah China ingin memisahkan peran dan fungsi pemerintah dan perusahaan dan membongkar sistem monopoli hulu dan hilir dengan membentuk kompetisi antar perusahaan.
2. Memperkenalkan ke industri migas China prinsip-prinsip sistem pasar dan mekanisme yang tercipta oleh sistem kompetisi antar perusahaan.

3. Menciptakan perusahaan minyak internasional untuk bersaing di kompetisi global<sup>54</sup>.

CNPC merupakan satu-satunya sponsor dan pengendali saham-saham PetroChina. CNPC merupakan BUMN yang berdiri pada Juli 1998 dan merupakan group perusahaan minyak dan kimia terbesar di China, CNPC berada di bawah naungan badan investasi dan komisi negara untuk supervisi aset negara dan administrasi<sup>55</sup>. PetroChina sebagai perusahaan yang berada dalam group CNPC bergerak di berbagai kegiatan, seperti eksplorasi, pengembangan produksi atau research and design, penyulingan, transportasi dan pemasaran minyak dan gas. PetroChina International memiliki 9 cabang domestik dan 7 cabang di luar negeri, serta memiliki 78 tempat penyulingan dan produksi bahan kimia dari dan ke 43 negara. PetroChina beroperasi di 26 negara dengan memiliki karyawan sebear 400.000 orang dan selama beroperasi PetroChina berhasil membangun tempat transit internasional antara lain di Minas, Basra (Irak) dan Oman untuk keperluan penyulingan minyak, gas dan industri pendukung. PetroChina juga aktif dalam berinvestasi di luar negeri dengan cara akusisi dan merger<sup>56</sup>. Keaktifan yang terlihat pula dalam perdagangan saham internasional dimana PetroChina memiliki saham di Hongkong, Shanghai dan New York.

Semenjak pembentukkannya, PetroChina telah menerapkan dan meningkatkan standar pengelolaan perusahaan multinasional berdasarkan peraturan dan UU perusahaan. PetroChina memiliki dua komitmen utama sebagai perusahaan minyak dan gas. Pertama, komitmen untuk menjadi perusahaan energi internasional yang memiliki daya saing dan pemain utama dalam produksi dan distribusi petroleum dan petrokimia di dunia. Kedua adalah untuk meningkatkan transformasi ekonomi, peningkatan kemampuan inovasi, membangun mekanisme keselamatan yang efektif dan berkelanjutan, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan konservasi energi dan menciptakan perusahaan yang harmonis, dengan

---

<sup>54</sup> Shizhi Guo, *The James A. Baker III Institute for Public Policy*, "The Business Development of China's Oil Companies : The Government to Business Relationship in China", Rice University, 2007, diakses [www.riceuniversity.com](http://www.riceuniversity.com), diakses 11/9/2009, 10:16, p 4

<sup>55</sup> [www.cnpc.com.cn/en/companyprofile/history](http://www.cnpc.com.cn/en/companyprofile/history), diakses 6 September 2009

<sup>56</sup> [www.cnpc.com.cn/en/ourbusiness](http://www.cnpc.com.cn/en/ourbusiness), diakses 17/9/ 2009

tujuan mencapai perusahaan energi internasional yang memiliki daya saing kuat dan tinggi<sup>57</sup>. Komitmen perusahaan yang diterjemahkan dalam kebijakan utama PetroChina yaitu *Energize, Harmonize* dan *Realize*.

Berangkat dari komitmen PetroChina maka tujuan perusahaan adalah menjadi *Multinational Corporation* (MNC) energi yang terkemuka. Untuk mencapai tujuan menjadi perusahaan energi internasional maka PetroChina telah memiliki sasaran yang hendak dicapai. PetroChina membaginya menjadi dua sasaran / tahap. Tahap pertama selama pembangunan lima tahun ke-11 dari tahun 2006-2010, perusahaan akan memfokuskan di bisnis inti perusahaan yaitu produksi dan distribusi migas, terus melakukan inovasi dalam industri migas internasional, menjaga peran perusahaan sebagai kekuatan ekonomi di China dan berusaha membangun perusahaan menjadi perusahaan energi internasional.

Tahap kedua adalah di tahun 2020, perusahaan akan semakin mengkonsolidasikan perannya sebagai kekuatan ekonomi di China, melakukan lompatan dalam bisnis internasional, mempromosikan peringkat perusahaan di jajaran perusahaan minyak internasional, peningkatan keuntungan dan mendapatkan nilai investasinya sesuai dengan standar internasional industri migas<sup>58</sup>. Perusahaan memiliki daya saing signifikan di pasar internasional dan menjadi salah satu perusahaan utama dalam produksi dan distribusi migas dan petrokimia. Perusahaan mampu meningkatkan index internasional dan menjadi perusahaan energi internasional dengan daya saing yang kuat.

Dalam usahanya mencapai sasaran di tahun 2020, PetroChina memiliki strategi pengembangan yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu strategi dibidang *resource* (sumber daya), *market* dan *internationalization*. Strategi di bidang sumber daya berdasarkan berdasarkan dalam *maximization*, diversifikasi dan secara teratur mengganti sumber daya *hydrocarbon* dengan menaati prinsip-prinsip kesetaraan penggunaan minyak dan gas. Perusahaan akan mempertinggi eksplorasi sumber daya domestik, meningkatkan akuisisi sumber daya di luar negeri, memperluas eksplorasi di lepas pantai, meningkatkan strategi *reserve* (cadangan) dan mengembangkan energi substitusi untuk mencapai pertumbuhan

---

<sup>57</sup> [www.PetroChina.cn/companyprofile/history](http://www.PetroChina.cn/companyprofile/history). diakses 2/6/2009, 22:19

<sup>58</sup> Ibid, hlm 3

produksi minyak dan gas yang cepat. Perusahaan berusaha mencapai terobosan dalam sumber daya energi, mengkonsolidasikan peran perusahaan dalam kegiatan *upstream* di China dan memperkuat fondasi untuk pengembangan perusahaan yang berkelanjutan.

Pada bagian *market* (pasar), perusahaan akan mengejar peran sebagai pemimpin di pasar internasional dan *maximization* keuntungan dengan menggunakan kelebihan di skala ekonomi dan operasi yang terintegrasi dari *upstream* ke *downstream*. Perusahaan akan meningkatkan efisiensi di pasar, pemanfaatan strategi pasar, mengembangkan segmen pasar internasional dan terus-menerus mempromosikan kemampuan dan daya saing perusahaan di pasar domestik dan internasional<sup>59</sup>.

Strategi di bidang *internationalization*, perusahaan akan menaati prinsip-prinsip aktif dan arif dan saling menguntungkan dan konsep "*incoming*" dan "*outgoing*" dan menggabungkan sumber daya, pasar, teknologi dengan modal, fokus di bisnis minyak dan gas. Perusahaan akan memperkuat kerjasama internasional dan lebih menekankan eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas di luar negeri, pengembangan *mid-stream* dan *downstream* dengan bijaksana, efektif dan cukup. Perusahaan secara aktif menyediakan diversifikasi sumber daya untuk impor, memperluas skala internasional dalam perdagangan migas untuk membangun PetroChina sebagai *Multinational Corporation* (MNC) dengan daya saing tinggi<sup>60</sup>.

Pada tahun 2008, PetroChina mengalami perkembangan signifikan dari manajemen dengan memfokuskan pengembangan sistem internal kontrol dan peningkatan proses manajemen bisnis, menekankan dalam pencegahan resiko dan menerapkannya dalam operasional perusahaan. Pembentukan dan pengembangan sistem internal kontrol mendorong PetroChina membuat badan pembuat keputusan untuk internal kontrol dan manajemen resiko yang dipimpin oleh Presiden PetroChina dan Chief Financial Officer (CFO). Departemen internal kontrol dan manajemen resiko berkedudukan di kantor pusat PetroChina dan

<sup>59</sup>([www.petrochina.com.cn/Ptr/Investor\\_Relations/Corporate\\_Social\\_Responsibility](http://www.petrochina.com.cn/Ptr/Investor_Relations/Corporate_Social_Responsibility), diakses 17/10/2009, jam 11:46 hlm 8

<sup>60</sup> Ibid, hlm 9

bertugas sebagai badan yang mengatur penyelenggara internal kontrol dan manajemen resiko dan mengkoordinir implementasi hubungan antar departemen dan peningkatan sistem internal kontrol.

Pada tahun yang sama, PetroChina juga membentuk beberapa komite baru dalam manajemen perusahaan sebagai upaya menjadi perusahaan multinasional yang terkemuka. Komite audit, komite remunerasi dan examination dan komite kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup dan komite investasi dan pengembangan. Tanggung jawab utama mereka adalah memberikan dukungan dan masukan kepada *Board Of Directors* (BOD) dalam pengambilan keputusan. Pertama adalah komite audit, tugas utama adalah mengawasi proses laporan keuangan, evaluasi kerangka kerja internal kontrol dan manajemen resiko, memeriksa dan menjaga fungsi internal audit dan membuat laporan tahunan tentang kinerja dari eksternal audit serta membantu dan bekerja sama dengan komite pengawas. Komite audit bertanggung jawab pula untuk memberikan penilaian atas temuan-temuan dan opini-opini dari manajemen perusahaan tentang efektivitas dari sistem internal kontrol dan melaporkannya tiap tahun ke BOD. Semua anak perusahaan dan kantor cabang domestik dan internasional memiliki departemen internal masing-masing<sup>61</sup>.

Kedua adalah komite remunerasi dan examination bertugas mengatur penilaian dari Presiden dan memberikan laporan ke BOD, mengawasi penilaian dari Senior Vice President (VP), VP, CFO dan pejabat senior lainnya di bawah pimpinan Presiden. Komite melakukan review skema insentif perusahaan, sistem remunerasi dan rencana perusahaan serta mengawasi dan memberikan penilaian atas implementasi rencana perusahaan. Komite mendorong reformasi dan peningkatan sumber daya perusahaan<sup>62</sup>.

Ketiga adalah komite kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup. Komite memiliki tujuan mencapai *zero injury, zero pollution, zero accident* dan mencapai level internasional dalam manajemen kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup. Kebijakan yang dikeluarkan komite adalah kebijakan berdasarkan asas people-

---

<sup>61</sup>[www.petrochina.com.cn/Ptr/Investor\\_Relations/Corporate\\_Governance\\_Structure/gzljg\\_2\\_4.htm](http://www.petrochina.com.cn/Ptr/Investor_Relations/Corporate_Governance_Structure/gzljg_2_4.htm), diakses 17/10/2009, jam 11:46, hlm 62

<sup>62</sup> Ibid, hlm 63

orientation, pencegahan, partisipasi umum dan peningkatan kinerja secara terus-menerus<sup>63</sup>.

Mereka bertugas mengawasi implementasi rencana kesehatan, keamanan dan perlindungan lingkungan hidup dan membuat rekomendasi kepada BOD dan Presiden. Komite melakukan penyelidikan atas kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dan mengawasi perbaikan-perbaikan akibat kecelakaan. Komite mengeluarkan pula peraturan-peraturan seperti *prohibitions for anti-violation*, peraturan tentang manajemen statistik lingkungan, peraturan pengawasan lingkungan dan klasifikasi sumber-sumber yang berbahaya / polusi.

Komite keempat adalah komite investasi dan pengembangan yang bertugas mempelajari rencana aksi strategis perusahaan yang diusulkan Presiden dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada BOD. Komite mempelajari dan membuat rekomendasi tentang anggaran investasi yang diusulkan Presiden kepada BOD dan terakhir mempelajari studi kelayakan sebelum investasi dan studi kelayakan investasi proyek di dalam dan luar negeri yang memerlukan persetujuan BOD.

Dari pemaparan tadi maka tujuan, strategi dan perubahan manajemen adalah terwujudnya PetroChina sebagai perusahaan multinasional. Sebagai perusahaan multinasional yang memiliki daya saing tinggi maka PetroChina memfokuskan dalam bisnis inti yaitu eksplorasi minyak dan gas alam. PetroChina sebagai salah aktor utama industri migas China memiliki ladang-ladang migas utama di China. PetroChina memiliki empat ladang minyak dan gas utama di China yang sampai sekarang menjadi pemasok utama dari kebutuhan migas bagi China yaitu ladang Daqing, Changqing, Tarim, Yumen, Liaohe, Xinjiang, dan Jilin dan belum termasuk ladang-ladang migas yang lebih kecil ataupun di luar negeri. Ladang Daqing merupakan ladang minyak yang sudah tua dan telah berproduksi dari tahun 1960 dan semakin lama produksi minyak Daqing menurun. Akan tetapi di tahun 2008, PetroChina sebagai pemegang hak pengelolaan Daqing berhasil menghasilkan 871 juta BOEPD minyak mentah dan 1864,2 juta kubik gas alam, secara total PetroChina berhasil menghasilkan 1182 juta barrel migas.

---

<sup>63</sup> [www.petrochina.com.cn/Ptr/Investor\\_Relations/Corporate\\_Social\\_Responsibility](http://www.petrochina.com.cn/Ptr/Investor_Relations/Corporate_Social_Responsibility) diakses 17/10/2009, jam 11:46, hlm 12



Peningkatan sebesar 5,7% dari produksi tahun lalu. Peningkatan produksi berhasil dicapai karena perusahaan mampu mengurangi kadar air hingga 90% dan recovery rate mencapai 50%<sup>64</sup>.

Kemajuan signifikan juga diperoleh di ladang Changqing yang melakukan program pengembangan dengan efisiensi biaya. Changqing menghasilkan secara total 22,25 juta ton minyak dan gas yang berarti peningkatan sebesar 16,8% dari hasil produksi tahun lalu<sup>65</sup>. Sementara PetroChina melakukan percepatan pembangunan ladang migas baru di Tarim, di tahun 2008 ladang migas Tarim memproduksi 6,54 juta ton minyak mentah dan 16,21 juta kubik gas alam dan jumlah total produksi mencapai 19,46 juta ton atau meningkat 8,7% dari produksi tahun lalu.

PetroChina melakukan eksperimen untuk ladang minyak Yumen, Liaohe, Xinjiang, dan Jilin dengan bertujuan mempertahankan meningkatkan produksi minyak dari ladang-ladang migas yang sudah menua. Perusahaan menggunakan metode *Steam Assited Gravity Drainage* (SAGD) dan untuk pertama kali setelah 10 tahun mengalami penurunan produksi, ladang migas Liahoe mengalami peningkatan produksi minyak mentah.

Pada tahun 2008, PetroChina mencatat volume perdagangan sebesar 127 juta metrik ton, meningkat 21% dari tahun 2007 dan di pasar saham pada akhir tahun 2007 CNPC memiliki 86,29% dari saham-saham PetroChina<sup>66</sup>. Hasil penelitian PFC Energy 50 sebuah lembaga konsultan energi Internasional bahkan menempatkan PetroChina sebagai perusahaan energi terbesar ke-2 di dunia pada tahun 2008, menurut PFC Energy 50 PetroChina memiliki *Market Capital* sebesar \$ 259,7 milyar<sup>67</sup>.

Sebelum menempati posisinya saat ini, PetroChina melalui perjalanan yang panjang, dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk

---

<sup>64</sup> [www.petrochina.com.cn/Ptr/Investor\\_Relations/Corporate\\_Social\\_Responsibility](http://www.petrochina.com.cn/Ptr/Investor_Relations/Corporate_Social_Responsibility) diakses 17/10/2009, jam 11:46, hlm 21

<sup>65</sup> Ibid, hlm 22

<sup>66</sup> [www.cnpc.com.cn/en/ourbusiness/markettrading](http://www.cnpc.com.cn/en/ourbusiness/markettrading), diakses 15 September 2009

<sup>67</sup> [www.PFCEnergy50.com/TheDefinitiveAnnualRankingoftheWorld'sLargetListedEnergyFirms](http://www.PFCEnergy50.com/TheDefinitiveAnnualRankingoftheWorld'sLargetListedEnergyFirms), diakses 15 September 2009



mencapai tujuannya. Dari sekian banyak perjanjian maupun keputusan perusahaan tercatat beberapa keputusan dan kerjasama yang patut dicermati.

Pada 4 Februari 2002, PetroChina melakukan kerjasama luar negeri dengan Royal Dutch Shell, Gazprom dan Hongkong & China Gas untuk membangun jaringan pipa gas sepanjang 2600 mil dari lapangan gas Tarim Basin ke Shanghai. Pembangunan dimulai pada tahun 2004 dan saat ini jaringan gas telah berfungsi untuk memenuhi pasokan gas di daerah Shanghai. Biaya yang dikeluarkan oleh ketiga perusahaan mencapai \$ 18 milyar. Pada September 2003, PetroChina memulai pembangunan pipa gas sepanjang 454 mil yang memiliki kapasitas 116 milyar cubic feet per tahun, pipa gas menghubungkan ladang migas Zhongxian di Sichuan ke provinsi Hubei dengan rencana perluasan jaringan pipa ke pesisir Timur China<sup>68</sup>. Bermodalkan pengalaman bekerja sama dengan perusahaan minyak internasional lainnya, periode 2006-2007 PetroChina mencatat prestasi antara lain berada di posisi ke-7 dalam "2005 global Top 50 Petroleum Companies" oleh American Petroleum Intelligency Weekly<sup>69</sup>, posisi ke-1 pada tahun 2006 dalam "Top 50 Asian Enterprise" oleh Business week dan mendapatkan penghargaan sebagai "The First Most Profitable Company in Asia in 2006" oleh Finance Asia<sup>70</sup>. Dalam kerjasama luar negeri PetroChina pada 30 Juni 2007 telah berhasil melakukan eksplorasi dan pengembangan ke 11 negara di dunia<sup>71</sup>.

Keputusan perusahaan yang menentukan posisi PetroChina saat ini adalah keputusan untuk mengeluarkan saham-saham jenis H sejumlah 3,97 milyar saham pada tanggal 15 September 2005 dan keputusan CNPC sebagai perusahaan induk untuk meningkatkan sahamnya di PetroChina sebanyak 60.000.000 saham melalui perdagangan saham di Shanghai Stock Exchange, sehingga meningkatkan modal untuk PetroChina dan kepemilikan CNPC hingga 86,32% di PetroChina<sup>72</sup>. Sebelum meningkatkan sahamnya di PetroChina, CNPC sebagai *holding company* melakukan kebijakan pemisahan antara bisnis inti dan bisnis pendukung. Dengan

<sup>68</sup> Energy Information Administration, "International Energy Outlook 2004", Washington DC 2004, diakses [www.eia.com](http://www.eia.com), 17/9/2009, 11:34

<sup>69</sup> [www.PetroChina.com.cn/companyprofile](http://www.PetroChina.com.cn/companyprofile), diakses 2/6/ 2009, hlm 2

<sup>70</sup> Ibid, hlm 2

<sup>71</sup> [www.cnpc.com.cn](http://www.cnpc.com.cn), diakses 17/ 9/ 2009

<sup>72</sup> [www.cnpc.com.comp.profile](http://www.cnpc.com.comp.profile), diakses 17/9/2009

memisahkan bisnis yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, bagi PetroChina implikasi kebijakan tersebut adalah rasionalisasi jumlah karyawan PetroChina. Pada awal pembentukan PetroChina memiliki 480.000 karyawan yang semuanya berasal dari CNPC, di tahun 2002 saat PetroChina gencar melakukan investasi di luar negeri seperti Indonesia jumlah tersebut telah berkurang menjadi 425.000 karyawan berarti ada pengurangan karyawan sebesar 55.000 orang<sup>73</sup>. Langkah PetroChina memperlurus reformasi BUMN menjadi perusahaan multinasional.

Sesuai dengan strategi *vertical integrated* yang dikembangkan oleh PetroChina maka PetroChina memiliki beberapa industri pendukung dan yang memiliki hubungan dengan proses produksi dan hasil produksi. Setidaknya ada 3 industri pendukung / penyuplai kebutuhan alat-alat produksi untuk PetroChina yaitu *China Petroleum Pipeline Bureau (CPP)*, *China Petroleum Materials Corporation (CPMC)* dan *China Railway Materials Commercial Corporation (CRM)*<sup>74</sup>. Ketiga perusahaan adalah BUMN milik China bahkan CPP telah MNC yang memiliki cabang di Kuwait, Tunis, Libya dan Mozambiq. Industri pendukung pertama adalah CPP, BUMN yang bergerak dalam pembangunan, konsultan, perbekalan, design dan manajemen pipa migas serta pembangunan kilang penyimpanan migas. CPP didirikan di tahun 1973 dan telah menjalin kerjasama dengan CNPC dan PetroChina semenjak dimulainya pembangunan pipa migas tahap pertama yang Barat dan Timur China.

Kedua adalah CPMC yang didirikan di tahun 1992, BUMN ini mengkhususkan menyuplai segala keperluan material dan peralatan pembangunan untuk industri minyak dan gas alam group CNPC seperti PetroChina. Penyediaan alat-alat proyek migas yang bersifat penting dan keperluan jangka panjang CNPC, peralatan perawatan, peralatan keselamatan, manajemen penyimpanan strategis untuk cadangan peralatan serta melakukan survey / studi kelayakan kualitas jasa suplai peralatan dan layanan purna jual.

<sup>73</sup> Shizhi Guo, *The James A. Baker III Institute for Public Policy*, "The Business Development of China's Oil Companies : The Government to Business Relationship in China", Rice University, 2007, diakses [www.riceuniversity.com](http://www.riceuniversity.com), diakses 11/9/2009, 10:16, hlm 10

<sup>74</sup> [www.PetroChina.cn/companyprofile/history](http://www.PetroChina.cn/companyprofile/history) , diakses 2/6/2009, 22:19, hlm 39 dan 156

Perusahaan pendukung ketiga adalah CRM, CRM didirikan pada Mei 1979 menggantikan posisi kementerian kereta api China. Sesuai dengan namanya yang *China Railway Commercial Corp* maka bisnis inti dari perusahaan menyediakan peralatan dan infrastruktur untuk sektor transportasi terutama sistem kereta api<sup>75</sup>. Tidak hanya memiliki bisnis inti, CRM memiliki bisnis skala menengah yaitu pembuatan gudang penyimpanan berskala besar dan distributor. Ketiga perusahaan memiliki kualifikasi A / Internasional dari kementerian Perdagangan dan kementerian Konstruksi.

Rencana perusahaan di tahun 2009 adalah tetap memfokuskan peningkatan sistem internal kontrol, proses manajemen bisnis yang lebih baik dan peningkatan pencegahan resiko. Penerapan sistem internal kontrol juga menjadi fokus dengan penguatan di pengawasan untuk menjamin kelanjutan dan efektivitas sistem internal kontrol.

## II.2 PetroChina di Indonesia

Keberadaan PetroChina dimulai tahun 2002, saat PetroChina melakukan akuisisi terhadap Devon Energy di Indonesia, dan melalui *PetroChina International Indonesia Ltd* secara resmi PetroChina hadir di industri pertambangan minyak dan gas Indonesia. Setahun berikutnya PetroChina membeli 45% saham kepemilikan pada kapal-operator di ladang minyak Indonesia, dan tahun 2004 PetroChina memiliki 25% kepemilikan dan hak beroperasi di ladang minyak Sukowati. Saat ini PetroChina memiliki beberapa kilang minyak dan gas di Indonesia seperti di Jabung (Jambi), Papua dan Jawa Timur<sup>76</sup>.

Saat ini *PetroChina International Indonesia Ltd* dipimpin oleh We Zhigang sebagai President PetroChina Indonesia dan dibantu oleh empat Vice President (VP) yaitu Zhang Xuewen sebagai VP Operations, Lei Cheng sebagai VP Business, B. Budi Setiadi sebagai VP Administration & Asset Manager dan Wei Qingjun sebagai VP Finance & Control. Mereka dibantu oleh tiga manager

<sup>75</sup> <http://www.crmc.com.cn/english/situation.asp?action=3>, diakses 29/10/2009, 12:21

<sup>76</sup> [www.PetroChina.cn/en/Indonesia/comp.profile](http://www.PetroChina.cn/en/Indonesia/comp.profile), diakses 17/9/2009

yaitu Liu Jianxin sebagai Asset manager, Hendra Widjayanto sebagai General manager dan Zhang Honglin sebagai Senior Project Manager.

PetroChina berinvestasi dan mengembangkan ladang minyak dan gas di Jambi, Papua dan Jawa Timur. PetroChina melakukan kerjasama PSC di blok Jabung sementara blok Tuban dan blok Salawati merupakan kerjasama JOB dengan Pertamina. Secara keseluruhan PetroChina berhasil menggandakan produksi dari 46.000 BOEPD (*barrels of oil equivalent per day*) ke 90.000 BOEPD dan menjadi salah satu distributor penting bagi kebutuhan gas di Singapore. Tidak berhenti di tiga blok saja, pada tahun 2003 PetroChina menawarkan investasi ke Indonesia untuk mengembangkan 10 blok minyak dan gas. Kesepuluh blok tersebar di provinsi Aceh, Banten, Jawa Timur dan Papua, dalam proses tender PetroChina mendapatkan saingan dari Chevron Pasific<sup>77</sup>. Sampai saat ini belum diketahui siapa yang memenangkan blok-blok migas baru yang tersebar di keempat provinsi tersebut.

Dari sisi pendapatan antara tahun 2002-2007, pendapatan pemerintah Indonesia meningkat dari \$ 200 juta ke \$ 1 milyar dengan total pendapatan mencapai \$ 3 milyar. PetroChina dalam 12 bulan ke depan akan mengebor 58 sumur untuk memenuhi tujuan mencapai 200.000 BOEPD di tahun 2012<sup>78</sup>. Untuk mewujudkan target tersebut PetroChina akan menanamkan modalnya senilai \$ 2 milyar selama 3 tahun. Perusahaan akan menggunakan dana tersebut untuk membeli beberapa ladang migas di Indonesia. Salah satu ladang migas yang akan dibeli dan dikembangkan adalah blok Natuna D Alpha di Riau jika perusahaan mendapatkan kepercayaan menjadi mitra Pertamina<sup>79</sup>. Sebagai catatan blok Natuna telah menjadi incaran berbagai perusahaan minyak internasional seperti Shell, Exxon, Petronas dan lainnya. Prestasi paling baru dalam kiprah PetroChina di Indonesia adalah perusahaan mendapatkan kontrak pengadaan LPG domestik untuk kebutuhan program konversi minyak tanah ke LPG. LPG yang dibutuhkan untuk program sekitar 5-6 juta ton per tahun. PetroChina memasok LPG ke

<sup>77</sup> Xinhua, "PetroChina to bid Indonesia's oil, gas tenders", diakses dari

[http://www.chinadaily.com.cn/en/doc/2003-12/16/content\\_290902.htm](http://www.chinadaily.com.cn/en/doc/2003-12/16/content_290902.htm), 1/12/2009, 03:09

<sup>78</sup> PetroChina International, "*PetroChina Internastional Companies in Indonesia*", PetroChina, 2009, hlm 10

<sup>79</sup> "PetroChina to invest USD2 billion in Indonesia", Thursday, Oct 23, 2008, diakses dari [http://www.youoilandgasnews.com/news\\_item.php?newsID=13556](http://www.youoilandgasnews.com/news_item.php?newsID=13556), 1/12/2009, 03:09

Pertamina selama tahun 2008 sebanyak 400.000 MT dari LPG refrigerated Jabung, Jambi<sup>80</sup>.

Dalam operasinya di Indonesia, PetroChina melakukan pula kerjasama dengan perusahaan penyedia peralatan dan jasa migas. PetroChina dalam operasinya di Indonesia bekerja sama dengan 3 perusahaan pendukung yaitu PT.Imeco, *Weatherford Int Ltd* dan *Bakerhughes*. Pertama adalah PT. Imeco Inter Sarana yaitu perusahaan nasional penyuplai peralatan industri migas. Imeco berdiri pada tahun 1972 dan memiliki 3 bisnis inti yaitu industri migas, tenaga pembangkit listrik dan proses produksi migas. Berkaitan dengan PetroChina maka kegiatan utama Imeco dalam pengadaan barang dan jasa di industri migas adalah pengembangan proyek-proyek prasarana energi seperti pembangkit tenaga listrik, pengembangan di layanan purna jual peralatan dan pengembangan bisnis di bidang instrumentasi termasuk solusi dan integrasi sistem instrumentasi<sup>81</sup>.

Perusahaan kedua adalah *Weatherford Int. Ltd*, suatu perusahaan internasional yang menyediakan peralatan dan jasa dalam pengeboran sumur-sumur migas. *Weatherford* beroperasi di lebih 100 negara dengan 800 kantor jasa dan 16 fasilitas R&D. *Weatherford* memiliki 5 bisnis inti, pertama adalah pembukaan / eksplorasi sumur-sumur baru migas, kedua pengembangan metode baru dalam pengukuran kuantitas dan kualitas migas. Ketiga adalah jasa penutupan sumur-sumur tua (*completion*), *Weatherford* menggunakan *expandable sand screen system* (ESS) untuk menutup sumur-sumur tua. Keempat adalah peningkatan produksi dengan memaksimalkan cadangan migas, *Weatherford* melakukan optimalisasi produksi migas di lebih 40.000 sumur migas di seluruh dunia. Terakhir adalah jasa perbaikan dan memperpanjang usia produktif sumur-sumur migas<sup>82</sup>.

Perusahaan ketiga adalah *Bakerhughes*, perusahaan ini merupakan hasil penggabungan 2 perusahaan *Baker Co* dan *Hughes Co* di tahun 1987, sedangkan

---

<sup>80</sup> MajalahTambang, "BP MIGAS Fasilitasi Kebutuhan LPG Domestik" 24 Juli 2008, diakses dari [http://www.majalah tambang.com/search\\_index.php?pagenw=2&category=&string=petrochina](http://www.majalah tambang.com/search_index.php?pagenw=2&category=&string=petrochina), 1/12/2009, 03:09

<sup>81</sup> [www.imeco.com](http://www.imeco.com), diakses 3/12/2009, 20:58

<sup>82</sup> [www.weatherford.com/weatherford/groups/public/documents/aboutwft/hist\\_areasoffocus.hcsp](http://www.weatherford.com/weatherford/groups/public/documents/aboutwft/hist_areasoffocus.hcsp), diakses 3/12/2009, 21:04

kedua perusahaan telah berkecimpung di industri migas sejak tahun 1907 dan 1909. *Bakerhughes* memiliki 2 bisnis inti yaitu *Driling, Evaluation, Completion, Production* dan *Reservoir Technology and Consulting Group* yang terdiri dari 3 anak perusahaan yaitu *Gafney, Cline & Associates, Geomechanics Int.* dan *RDS*.

Fokus utama dari bagian *Driling, Evaluation, Completion and Production* adalah memberikan jasa kepada perusahaan minyak bekerja lebih efektif, memiliki kemampuan pengolahan data secara akurat, meningkatkan produksi dan pengelolaan limbah migas. *Bakerhughes* memberikan jasa dalam proses penutupan (*completion*), bagaimana perusahaan membuat solusi jika menghadapi permasalahan, mengatur biaya produksi, menurunkan resiko pekerjaan dan meningkatkan recovery sumur-sumur migas. *Bakerhughes* juga menyediakan teknologi pemisahan hydrocarbon, transportasi dan pembangunan sistem distribusi migas.

Fokus utama dari *Reservoir Technology and Consulting Group* adalah memberikan penilaian dan studi kelayakan dalam pengembangan sistem migas yang terintegrasi, penyediaan data-data cadangan migas dan manajemen perusahaan minyak internasional yang terintegrasi. Kesemua jasa dilakukan oleh 3 anak perusahaan *Bakerhughes* yaitu *Gafney, Cline & Associates, Geomechanics Int.* dan *RDS*<sup>83</sup>.

Telah diketahui bahwa PetroChina memiliki hak mengelola tiga blok migas yaitu blok Jabung di provinsi Jambi, Tuban di provinsi Jawa Timur dan Salawati di provinsi Papua Barat, berikut adalah lokasi blok-blok migas yang dikelola oleh PetroChina :

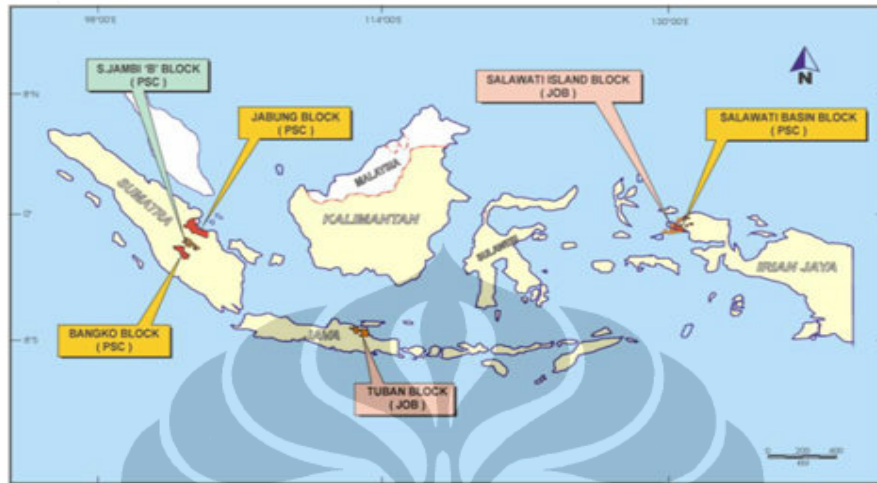
---

<sup>83</sup> [www.bakerhughesdirect.com/cgibin/bhi/myHomePage/welcome.jsp?func=cert&goto=%2fmyHomePage%2fmyHomePage.js](http://www.bakerhughesdirect.com/cgibin/bhi/myHomePage/welcome.jsp?func=cert&goto=%2fmyHomePage%2fmyHomePage.js), diakses 3/12/2009, 21:18



Gambar. 2.2

### Peta blok mgas milik PetroChina



Sumber : [www.bpmigas.go.id](http://www.bpmigas.go.id)

#### II.2.1 Sumatera

PetroChina mengawali kiprahnya di industri migas Indonesia saat mengakuisisi Blok Jabung dari Devon Energy di tahun 2002. Blok Jabung berada di provinsi Jambi dan berada di kabupaten Tanjung Timur. Menurut data BP Migas, PetroChina melakukan bentuk kerja sama Production Sharing Contract (PSC) dengan beberapa perusahaan dalam pengelolaan Blok Jabung sementara PetroChina berperan sebagai operator<sup>84</sup>. Dalam pengelolaan Blok Jabung PetroChina bekerja sama dengan *Petronas National Berhad*, *PP Oil & Gas Ltd* dan Pertamina EP, keempat perusahaan membentuk *PetroChina International Jabung Ltd* yang bermarkas di Singapura. Namun tidak semua Blok Jabung dikelola oleh PetroChina, ada satu blok yaitu Jambi Selatan (South Jambi “B”) yang pengelolaannya oleh *ConocoPhillips*. Pada blok Jambi Selatan PetroChina bekerja sama dengan *ConocoPhillips* dan Pertamina.

Blok Jabung terdiri dari ladang migas North Geragai, Makmur, North Betara, Morteast Betara dan Gemah. PetroChina berinvestasi di dua NGL (*natural gas liquids*) di North Geragai, LPG (*Liquid petroleum gas*) di North

<sup>84</sup> [www.bpmigas.go.id/petrochina](http://www.bpmigas.go.id/petrochina), diakses 13/10/2009, 00:39



Geragai dan Makmur. Kedua ladang migas saat ini memproduksi 2,700 barrel minyak, 30 juta kubik gas, 650 barrel kondensat, dan 1.100 barrel LPG per hari. Pada tahun 2005 PetroChina berinvestasi membangun fasilitas pengolahan, yang terdiri dari fasilitas penyimpanan dan pendinginan LPG di lepas pantai serta terminal untuk minyak mentah dan kondensat yang memudahkan PetroChina mengirim ke pasar internasional dan domestik. Setiap harinya fasilitas Betara memproduksi hingga 250 juta kubik gas dan 100 juta kubik gas mentah, 10.000 barrel kondensat dan 1380 metric ton LPG<sup>85</sup>.

Pada tahun 2003, PetroChina memulai penjualan gas ke Singapura dengan kontrak selama 20 tahun. PetroChina dan dua perusahaan lainnya akan menjual hingga 350 standar kubik gas per hari ke Singapura. Pada tahun 2008, PetroChina menyuplai 41% dari gas yang dibutuhkan dan menjual 130 juta kubik gas per hari. PetroChina menyuplai melalui pipa gas sepanjang 450 km yang berhubungan dengan sistem pipa koridor Duri melalui Batam ke Singapura.

Minyak dan gas ditemukan di Ripah pada tahun 2001, West Betara di tahun 2004 dan Southwest Betara tahun 2005. Pada tahun 2007 PetroChina menggali 6 sumur eksplorasi dan semuanya berhasil. PetroChina telah membuktikan keseluruhan sumur menghasilkan 2.066 barrel minyak dan kondensat per hari dan 39 juta kubik gas per hari<sup>86</sup>. Pada tahun yang sama PetroChina memperluas eksplorasi dengan membuka ladang migas baru di 4 kabupaten di sekitar kabupaten Tanjung Timur. Dua kabupaten awal yang masuk dalam perluasan eksplorasi adalah kabupaten Sarolangun dan Merangin yang nanti akan diperluas 2 kabupaten lagi<sup>87</sup>. Jika perluasan eksplorasi migas baru berhasil maka pemerintah provinsi Jambi akan mendapatkan tambahan saham 10% dari bagi hasil perimbangan keuangan pusat dan daerah, dari blok Jabung saja pemerintah provinsi Jambi memperoleh saham sebesar 15% dari PetroChina.

---

<sup>85</sup> PetroChina International, "*PetroChina Internasional Companies in Indonesia*", PetroChina, 2009, hlm 5

<sup>86</sup> Ibid, hlm 6-7

<sup>87</sup> Investor Daily, "PetroChina Perluas Wilayah Eksplorasi di Jambi", 23 November 2007, diakses dari [www.investorindonesia.com/index.php?searchword=petrochina&option=com\\_search&Itemid,1/12/2009,03:09](http://www.investorindonesia.com/index.php?searchword=petrochina&option=com_search&Itemid,1/12/2009,03:09)

Dalam kegiatan eksplorasi sumur-sumur lainnya, *PetroChina International Jabung* telah menemukan cadangan minyak baru di sumur Marmo, di area sekitar North Betara, Jambi di tahun 2008. Hasil tes sumur eksplorasi Marmo-1 memperlihatkan harian sumur tersebut mencapai 2.484 BOEPD. Penemuan cadangan minyak baru di blok Jabung akan menambah produksi dari blok Jabung, PetroChina merencanakan sumur-sumur baru tersebut bisa beroperasi awal tahun 2009 sebesar 500 BOEPD. Sumur Marmo-1 merupakan salah satu dari 7 sumur eksplorasi yang selama tahun 2008 menjadi program eksplorasi PetroChina di blok Jabung. Blok Jabung sendiri memproduksi 59.000 BOEPD minyak, kodensat dan gas. Akumulasi total produksi adalah lebih dari 56 juta barrel minyak, 9 juta barrel kodensat, 1,2 juta metrik ton LPG dan 450 milyar kubik gas.

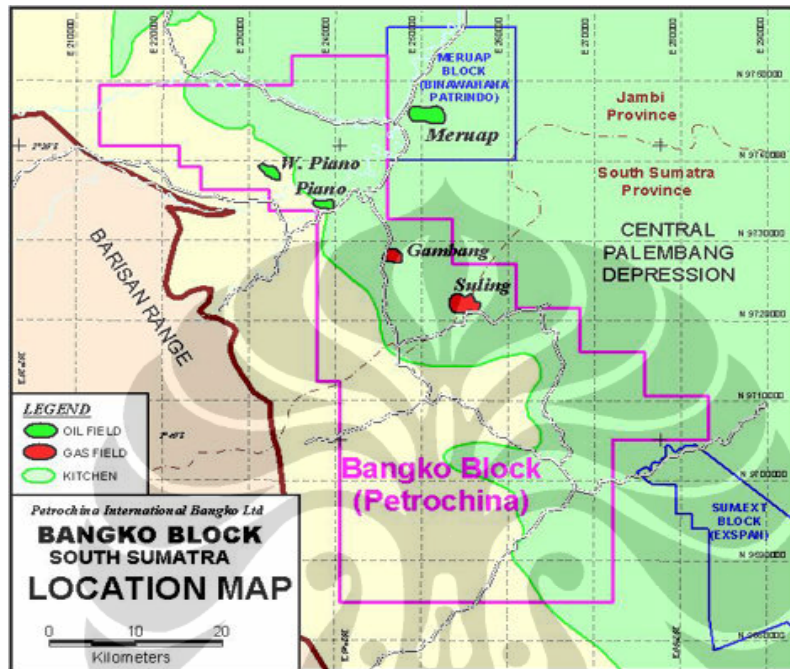
Blok terakhir adalah Blok Bangko yang meliputi daerah provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Bentuk pengelolaan blok Bangko adalah PSC dan PetroChina mendapatkan kepercayaan sebagai operator blok. PetroChina bekerja sama dengan *SK Corporation* dan *Elpaso* dalam kepemilikan Blok dengan PetroChina sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 50%<sup>88</sup>. *SK Corporation* merupakan perusahaan minyak Korea Selatan yang didirikan di tahun 1964 dan sama dengan PetroChina telah mengalami beberapa kali reformasi dalam pengelolaan oleh pemerintah Korea Selatan<sup>89</sup>. Sementara *Elpaso* merupakan perusahaan migas internasional asal AS yang memfokuskan pada kegiatan eksplorasi dan distribusi melalui pipanisasi minyak dan gas. Ketiga perusahaan membentuk *PetroChina International Bangko Ltd* yang bertanggung jawab atas Blok Bangko. Blok Bangko memiliki dua ladang migas utama yaitu Gambang dan Kenong. Ladang migas Gambang di Blok Bangko menurut PetroChina memiliki cadangan gas sebesar 55 milyar standar kubik gas (BCSF). Pada tahun 2006 PetroChina mengebor dua sumur eksplorasi gas di ladang Kenong yang diperkirakan menyimpan cadangan gas sebesar 14 juta standar kubik gas. Berbeda dengan kedua Blok terdahulu, Blok Bangko masih dalam tahap eksplorasi dan belum memasuki tahap produksi yang siap untuk diekspor. Berikut adalah peta blok Bangko yang berasal dari BP Migas;

---

<sup>88</sup> [www.bpmigas.go.id/petrochina](http://www.bpmigas.go.id/petrochina), diakses 13/10/2009, 00:39

<sup>89</sup> [www.skenergy.com/companyprofile](http://www.skenergy.com/companyprofile), diakses 15/10/2009, 02:04

Gambar 2.3



Sumber : [www.skenergy.com/compnyprofile](http://www.skenergy.com/compnyprofile)

Sesuai dengan rencana perluasan blok migas di Sumatera baik di Blok Jabung dan Bangko, PetroChina memperluas cangkupan operasinya ke provinsi Riau melalui PetroChina Int. Jabung Ltd. Salah satu blok migas yang hendak dibeli oleh PetroChina adalah blok Coastal Plains Pekanbaru (Blok CPP) yang dikelola oleh BUMD yaitu PT. Bumi Siak Pusako (BSP). Akan tetapi tidak seperti proses pembelian / akusisi blok-blok terdahulu, kali ini PetroChina mendapatkan hambatan dari P.T BSP yang mengindikasikan menolak tawaran PetroChina dengan alasan nasionalisme.

Padahal PetroChina menunjukkan keseriusannya membeli blok CPP dari PT. BSD, sebagai bukti dari keseriusan PetroChina adalah kedatangan CEO PetroChina Int. Ltd Jiang Jemin ke Indonesia dan bertemu Presiden RI dan mengutarakan keinginan PetroChina untuk mengakusisi blok CPP dan Suban-3

memiliki ConocoPhillips di Sumatera Selatan<sup>90</sup>. Blok CPP sebelum dikelola PT. CPP dimiliki oleh Chevron Pasific dengan produksi 60.000 BOEPD, saat PT. CPP mengambil alih produksi blok CPP telah menurun. Saat ini produksi blok CPP menjadi 24.000-25.000 BOEPD dikarenakan menuanya sumur-sumur migas dan belum diterapkannya teknologi yang mampu meningkatkan produksi minyak.

## II.2.2 Jawa (Blok Tuban)

Pada tahun 2004 PetroChina memiliki 25% kepemilikan ladang Sukowati, blok Tuban dan dalam operasional PetroChina bekerja sama dengan Pertamina dengan bentuk kerjasama *Joint Operation Body* (JOB). Pada awal kerjasama JOB PetroChina menggandeng PT Medco E&P sebagai mitra, di Agustus 2008 Medco E&P memutuskan untuk menjual kepemilikannya kepada Pertamina melalui PT. Pertamina Hulu Energi dan PT. Pertamina Gas. Sehingga Pertamina memiliki 75% saham blok Tuban dan PetroChina beserta Pertamina membentuk JOB Pertamina PetroChina East Java sebagai operator di Blok Tuban. Nilai investasi PetroChina di Blok Tuban tercatat di tahun 2003-2004 sebesar \$ 1.101.719 di kedua ladang migas Sukowati dan Mudi<sup>91</sup>.

Pada awal kerjasama JOB dengan Pertamina, hasil produksi minyak di ladang Sukowati hanya 7.000 BOEPD yang berasal dari 2 sumur minyak. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan signifikan dari produksi minyak yang mencapai 24.500 BOEPD dan JOB PetroChina dan Pertamina mengebor empat sumur baru sehingga ada tujuh sumur minyak di ladang Sukowati, sementara ladang Mudi di tahun 2008 berhasil memproduksi 3.500 BOEPD dan 18 sumur minyak<sup>92</sup>.

Ladang Sukowati dan Mudi merupakan ladang minyak yang ditemukan di tahun 1930-an oleh pemerintah Belanda dan merupakan area produksi minyak bumi terbesar di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baru di tahun 1997 minyak bisa disalurkan secara cepat dengan melalui pipa sepanjang 18 km ke

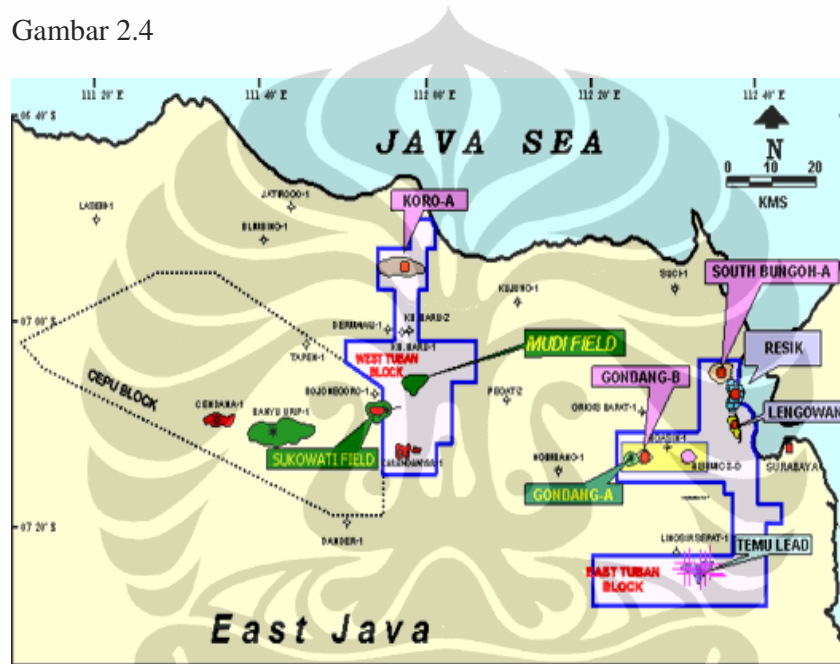
<sup>90</sup> Investor Daily, "Bumi Siak Tolak Pinangan PetroChina", 26 November 2007, diakses dari [www.investorindonesia.com/index.php?searchword=petrochina&option=com\\_search&Itemid,1/12/2009,03:09](http://www.investorindonesia.com/index.php?searchword=petrochina&option=com_search&Itemid,1/12/2009,03:09)

<sup>91</sup> [www.bpmigas.go.id/petrochina](http://www.bpmigas.go.id/petrochina), diakses 13/10/2009, 00:39, p 5

<sup>92</sup> PetroChina International, "*PetroChina International Companies in Indonesia*", PetroChina, 2009, hlm 11-13

pantai untuk diekspor. Dengan kata lain daya saing blok Tuban meningkat kembali setelah tahun 1997. Akuisisi blok Tuban oleh PetroChina memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menunjukkan kemampuan dalam meningkatkan produksi minyak di ladang Sukowati dan Mudi dari hanya 5.000 BOEPD di tahun 2004 menjadi 28.000 BOEPD di awal tahun 2008. Pada April 2008 PetroChina dan Pertamina memperingati produksi minyak ke 50 juta barrel. Berikut adalah peta area blok Tuban :

Gambar 2.4



Sumber : [www.bpmigas.go.id/petrochina](http://www.bpmigas.go.id/petrochina)

Berbeda dengan blok Jabung dan Salawati, blok Tuban memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Blok Tuban memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada kedua blok lainnya, memiliki nilai historis dalam perkembangan industri migas Indonesia dan berada berdekatan dengan blok Cepu yang memiliki cadangan migas tinggi. Implikasinya rencana perluasan eksplorasi PetroChina tidak semulus di kedua blok lainnya. Salah satu hambatan adalah penolakan uji coba eksplorasi di sumur Lengowangi-1, desa Balongwangi, Gresik. Penolakan warga dikarenakan letak sumur yang dekat dengan pemukiman

masyarakat sekitar 300 m, warga mengkhawatirkan limbah yang disebabkan kegiatan eksplorasi sumur Lengowangi-1<sup>93</sup>.

Hambatan lain di blok Tuban adalah masalah perijinan eksplorasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Hambatannya adalah ijin eksplorasi yang memerlukan ijin analisa dampak lingkungan (AMDAL). Pada tahun 2006 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui pemerintah Kabupaten Bojonegoro menilai PetroChina belum mengurus perijinan AMDAL untuk kegiatan eksplorasi di sumur Sukowati-5. Berdasarkan surat dari KLH no. B-6217/Dep.V-4/LH/09/2006 yang menyatakan pengembangan sumur minyak di desa Campurrejo, Bojonegoro belum mengantongi izin dan harus ditutup total setelah dilakukan uji produksi<sup>94</sup>, oleh karena itu PetroChina segera mengurus izin AMDAL ke KLH. Menurut Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup KLH Hermien Roosita, ketika akan memulai eksploitasi perusahaan tambang seharusnya sudah mengantongi izin AMDAL dari KLH, sedangkan PetroChina tidak memiliki izin Amdal di Sukowati-5. BP Migas sebagai badan yang mengeluarkan izin pertambangan sumur minyak Sukowati seharusnya mendorong PetroChina mengurus izin AMDAL ke KLH dan memberitahu ke KLH. Terlihat bahwa salah satu hambatan PetroChina di blok Tuban ialah kurang koordinasinya instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam proses perizinan eksplorasi.

### II.2.3 Papua

Blok ketiga milik PetroChina di Indonesia adalah Blok Salawati yang berada di Papua, PetroChina memiliki hak beroperasi di Blok Salawati pada tahun 2002 sementara pada saat diambil alih Blok Salawati memiliki 234 sumur minyak namun telah melewati puncak produksi yang terjadi di dekade 70-an dengan produksi 4.500 sampai 100.000 BOEPD. Blok Salawati terdiri dua blok utama

<sup>93</sup> Investor Daily, "PetroChina Lanjutkan Lengowangi-1 ", 28 Desember 2006, diakses dari [www.investorindonesia.com/index.php?searchword=petrochina&option=com\\_search&Itemid,1/12/2009,03:09](http://www.investorindonesia.com/index.php?searchword=petrochina&option=com_search&Itemid,1/12/2009,03:09)

<sup>94</sup> Investor Daily, "PetroChina Proses Izin Amdal Sukowati-5 ke KLH ", 4 Oktober 2006, diakses dari [www.investorindonesia.com/index.php?searchword=petrochina&option=com\\_search&Itemid,1/12/2009,03:09](http://www.investorindonesia.com/index.php?searchword=petrochina&option=com_search&Itemid,1/12/2009,03:09)



yaitu Blok Salawati kepala burung dan Blok Salawati Island (pulau), semenjak mulai beroperasi di tahun 1973 kedua Blok telah memproduksi 334 juta barrel minyak.

Pada tahun 2008 PetroChina berhasil meningkatkan produksi minyak dari 4.500 ke 6.300 BOEPD dan melakukan pengembangan di empat sumur baru di ladang Wakamuk dan tiga sumur eksplorasi di Blok Walio untuk mencari minyak dan gas<sup>95</sup>. Untuk mendukung fasilitas di Blok Salawati, PetroChina membangun terminal minyak di pantai (Kasim Marine Terminal) yang mampu menyimpan hingga 1,8 juta barrel minyak dan pelabuhannya mampu dirapati oleh tanker sepanjang 950 kaki. Fasilitas Kasim Marine Terminal memiliki kemampuan produksi di *onshore* dan *offshore* mencapai 5.150 BOEPD dan memberikan keuntungan bagi PetroChina dengan semakin efisien dan efektif dalam produksi dan distribusi minyak dan gas. Setahun sebelumnya (2007) PetroChina berhasil menemukan cadangan minyak baru di ladang minyak Bagong dimana PetroChina mampu memproduksi minyak mentah sebesar 1000 BOEPD saat ladang minyak telah memasuki masa produksi. BP Migas mencatat nilai investasi awal PetroChina di Blok Salawati senilai \$ 1.500.384 dan merupakan investasi terbesar yang dilakukan PetroChina di Indonesia<sup>96</sup>.

PetroChina memiliki dua jenis usaha yang bertanggung jawab atas pengelolaan Blok Salawati, yang pertama adalah *Joint Operation Body* (JOB) PetroChina dan Pertamina yang bertempat di kepala burung dengan nama perusahaan PetroChina Pertamina Salawati Island. Selain Pertamina, PetroChina menggandeng dua perusahaan lain yaitu *Lundin Indonesia B.V* dan *PearOil (Island) Ltd*<sup>97</sup>. *Lundin Indonesia B.V* adalah cabang dari perusahaan *Lundin Petroleum Ltd* yaitu perusahaan minyak internasional berasal dari Swedia dan *PearOil* adalah anak perusahaan dari *Pearl Energy Ltd* yaitu perusahaan minyak internasional yang memfokuskan pada kegiatan *upstream*. *Pearl Energy* merupakan perusahaan yang di bawah bendera group *Mubadala Development Company* yaitu suatu perusahaan investasi berasal dari Uni Emirat Arab (UEA)

<sup>95</sup> PetroChina International, “*PetroChina International Companies in Indonesia*”, PetroChina, 2009, hlm 15

<sup>96</sup> [www.bpmigas.go.id/petrochina](http://www.bpmigas.go.id/petrochina), diakses 13/10/2009, 00:39

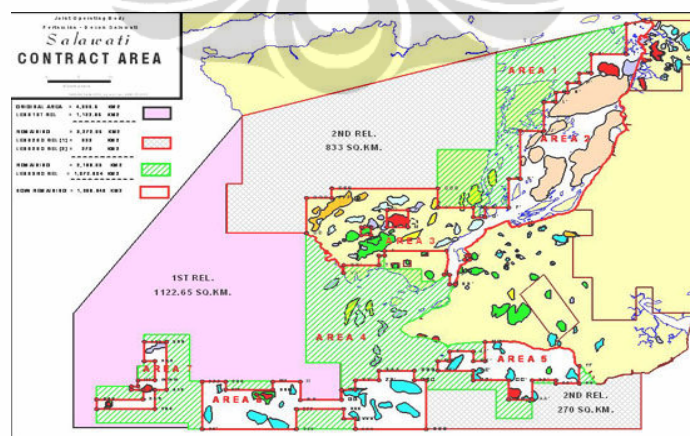
<sup>97</sup> *Ibid*, p 4



dan memiliki kilang migas di Asia Selatan<sup>98</sup>. Luas area yang dikelola oleh JOB PetroChina Pertamina Salawati Island adalah 1097 km<sup>2</sup> dan memiliki 4 ladang minyak dan gas yaitu Matoa Utama, Matoa-20, Matoa-29 dan SW "O" fields, dan memiliki ladang di onshore dan offshore<sup>99</sup>. Kemampuan produksi JOB PetroChina Pertamina mencapai 4.200 BOEPD. Kontrak kerjasama antara keempat perusahaan akan berakhir sampai 22 April 2020.

Jenis kedua ialah perusahaan yang berada dalam naungan *PetroChina International (Bermuda) Ltd* yaitu *PetroChina Salawati Company* dengan bentuk PSC yang bertindak sebagai operator. Sama dengan JOB Pertamina dan PetroChina, dua perusahaan lainnya adalah *Lundin* dan *PearOil Ltd*. Berbeda dengan JOB, *PetroChina Salawati Company* bertanggung jawab langsung dan mendapat pedoman kebijakan dari *PetroChina International (Bermuda) Ltd*. Luas area Salawati Basin mencapai 1000 km<sup>2</sup> dan wilayah operasinya mencapai 872 km<sup>2</sup>. Salawati Basin terletak di *onshore* di Papua Barat dan memiliki 2 area operasi. Pertama Area Selatan meliputi blok Wali, Kasim, Cendrawasih yang ketiga mulai dieksplorasi pada tahun 2004 dan mulai produksi di tahun 2005. Kemudian area Utara yang meliputi blok Arar, Klalin dan Terumbu, ketiga blok memproduksi minyak dan gas. Berikut adalah peta area JOB PetroChina Pertamina dan PSC Salawati Basin;

Gambar 2.5



Sumber : <http://www.jobpertamina-petrochina.com/covarea.htm>

<sup>98</sup> [www.companiesandmarket.com/pearl-energy-ltd](http://www.companiesandmarket.com/pearl-energy-ltd), diakses 15/10/2009, 01:15

<sup>99</sup> Lundin Indonesia, "company profile", diakses [www.lundinpetroleum.com](http://www.lundinpetroleum.com), 16/11/2009, 00:26

Jika dibandingkan dengan blok Tuban dan Jabung, Blok Salawati kurang mendapatkan pemberitaan di media massa tentang perkembangan situasi dan kondisi kecuali tentang jumlah produksi PetroChina Salawati Company yang mencapai 6.300 BOEPD di tahun 2008. Perkembangan terbaru dari Blok Salawati adalah pemerintah Indonesia melalui BP Migas memberikan target produksi untuk PetroChina sebesar 8.460 BOEPD di tahun 2010. Blok Salawati menjadi salah satu dari 25 ladang minyak bumi yang menjadi andalan untuk memenuhi target produksi sebesar 965.000 BOEPD di tahun 2010.

Dari penjelasan tentang *PetroChina Company Ltd* dan *PetroChina International Indonesia Ltd* maka FSA PetroChina tetap berada di *home country*. Pada bagian awal terlihat PetroChina memiliki strategi perusahaan, pengembangan aset, kemampuan pemasaran, investasi dan reformasi manajemen yang difokuskan di *home country*. Fokus pengembangan di *home country* terlihat tahap pertama pembangunan 2006-2010, yang memfokuskan di bisnis inti perusahaan, berusaha membangun perusahaan menjadi perusahaan energi internasional dan yang paling penting menjaga peran perusahaan sebagai kekuatan ekonomi di China.

Pada konteks Indonesia, FSA *PetroChina International Indonesia Ltd* tidak sekuat dibandingkan FSA di *home country*. Dari penjelasan di subbagian sebelumnya ada dua penghambat FSA PetroChina yaitu faktor teknis, *PetroChina International Indonesia Ltd* memiliki ladang migas yang memasuki usia tua sehingga telah mengalami penurunan produksi minyak bumi. Walaupun PetroChina telah berhasil menaikkan kapasitas produksi di beberapa ladang migas. Penghambat berikutnya adalah faktor sosial, PetroChina mendapatkan hambatan dari masyarakat sekitar ladang migas maupun dari operator migas di daerah. Salah satu contohnya adalah penolakan perluasan investasi PetroChina di blok Jabung dan Tuban oleh BUMD dan masyarakat. Padahal PetroChina telah menunjukkan kseriusaannya dengan kedatangan CEO PetroChina Company Ltd ke Indonesia.

### Bab III

#### Kebijakan Energi China dan Indonesia

Pada bab ini, saya menyajikan penjelasan kebijakan energi di dua negara yaitu China sebagai *home country* dari PetroChina dan Indonesia sebagai *host country*. Penjelasan tentang kebijakan energi di kedua negara berkaitan erat dengan strategi usaha PetroChina, dan sesuai dengan pemikiran Dicken, Ramamurti dan Porter tentang peran pemerintah. Dalam pemikiran Porter, pemerintah mempengaruhi empat faktor dalam teori “diamond” karena pemerintah tidak hanya sebagai regulator tapi juga sebagai konsumen.

Kebijakan energi China akan dijelaskan sejak reformasi ekonomi tahun 1978 sampai dengan pemerintah China mengeluarkan “*white paper on energy*” di tahun 2007, sementara kebijakan energi Indonesia dijelaskan sejak periode sebelum UU no. 22/2001 atau masa UU no. 8/1971 tentang Pertamina sampai dengan penerapan UU no.22/2001 tentang minyak dan gas. Selain dengan kebijakan energi Indonesia, saya menjelaskan peluang / kesempatan (*role of chance*) yang dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui perubahan UU atau kebijakan dalam industri minyak dan gas serta penanaman modal asing.

Kerjasama kedua negara juga akan dipaparkan yaitu *Indonesia China Energy Forum* (ICEF) yang telah diselenggarakan sebanyak 3 kali. ICEF akan menjelaskan peran negara / pemerintah dalam konteks hubungan host dan home country sesuai dengan pemikiran Dicken dan Ramamurti yang bertujuan untuk mendorong maupun menarik investasi MNC dari masing-masing negara.

#### III.1 Kebijakan Energi China

##### III.1.1 Kebijakan Energi awal reformasi ekonomi 1978

Sebelum terbentuknya Republik Rakyat China (RRC) pada tahun 1949, China dikenal sebagai negara yang kurang sumber daya minyak. Perubahan terjadi setelah 1949, setelah China bekerja sama dengan Uni Sovyet untuk membangun seluruh kekuatan sumber daya alamnya. Kebijakan energi pun disusun dan masuk dalam bagian perencanaan nasional, dan institusi yang bertanggung jawab dalam membuat rencana adalah Komisi Perencanaan Nasional (KPN) / *State Planning*

*Commission* yang dibentuk pada tahun 1952, KPN bertugas membuat rencana pembangunan setiap 5 tahunan<sup>100</sup>. Pada proses pengambilan kebijakan dan keputusan tentang pembangunan nasional dan khususnya kebijakan energi, mereka mendapatkan arahan dari *State Council*, bahkan kontrol dari *State Council* terlihat pula dalam anggota pimpinan KPN. Para Pimpinan KPN dicalonkan oleh *State Council* dan harus mendapat persetujuan dari Kongres Rakyat Nasional.

KPN memiliki beberapa fungsi utama antara lain, pertama mengeluarkan kebijakan tentang investasi, harga, produksi, distribusi, rencana produksi, ekspor-impor dan tenaga kerja dalam bidang energi<sup>101</sup>. Kedua menyusun kebijakan energi 5 tahunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan dalam penyusunannya KPN memiliki 2 biro khusus yang menyusun kebijakan 5 tahunan yaitu biro *Fuel & Power Planning Bureau* dan *Energy Conservation Bureau*.

Selain KPN, institusi yang berwenang dalam kebijakan energi adalah Kementerian Industri Minyak yang bekejasama dengan Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral. Kedua kementerian didukung oleh 2 *State Owned Enterprise* (SOE) yaitu CNOOC dan Sinopec yang terbentuk pada tahun 1982 dan 1983. CNOOC dibentuk oleh pemerintah dan memiliki tugas untuk melakukan eksplorasi dan produksi minyak di lepas pantai dan bekerja sama dengan perusahaan multinasional, Sinopec merupakan BUMN gabungan fungsi dari kementerian industri minyak dan kementerian industri kimia dan memiliki tugas melakukan eksplorasi minyak dan gas. Pada akhir dekade 80-an terjadi pergeseran kembali, dengan terbentuknya SOE baru yaitu CNPC yang menggantikan peran Kementerian Industri Minyak pada tahun 1988. CNPC merupakan BUMN yang berbentuk holding company.

Pemerintah China pun mengatur daerah operasi ketiga BUMN dan memberikan segmen pasar yang berbeda. CNPC diproyeksikan sebagai pemimpin dalam kegiatan *upstream* yang berlokasi di Utara dan Barat China, Sinopec diproyeksikan sebagai pemimpin di sektor *downstream* di wilayah Selatan dan Timur China, sementara CNOOC memfokuskan pada kegiatan *upstream* lepas

<sup>100</sup> Kenneth Lieberthal dan Micheal Oksenberg, *“Policy Making in China Leaders, Structures and Process”*, Princeton University Press, New Jersey 1988, hlm 64

<sup>101</sup> NJD. Lucas, J. Ambali, E. Chang, M. S Forbes Ricarte, R. M Shresth, *“Energy Policies in Asia : A Comparative Study”*, McGraw-Hill Book Company, London 1987, hlm 128

pantai dan sepanjang pesisir Timur China. Pembagian fokus perusahaan dan wilayah operasi oleh pemerintah agar para BUMN tidak terlibat persaingan namun dalam perkembangannya persaingan antar BUMN meningkat secara signifikan.

Kebijakan energi yang ditempuh pada masa Mao dan selama reformasi ekonomi tahun 1978-1990 adalah *self sufficiency* yang mengacu pada ambisi nasionalis pemerintah Partai Komunis<sup>102</sup>. Implikasinya China tidak mendapatkan devisa saat terjadi Oil Boom dan tidak mengalami guncangan saat harga minyak bumi meningkat. Dengan kebijakan *self sufficiency*, China mengantisipasi ketergantungan energi dan pengelolaannya terhadap pihak asing.

Kebijakan energi China yang semenjak era Mao sampai dengan sekarang dan tetap dipertahankan adalah kontrol terhadap harga BBM dan gas dengan mekanisme subsidi, dalam perkembangannya China mulai menurunkan subsidi sehingga dalam 30 tahun terakhir harga BBM mulai mendekati harga di internasional, walau tidak akan dihapuskan. Hambatan-hambatan sulitnya menghapus kebijakan subsidi adalah karena adanya hak-hak istimewa pemerintah lokal dalam kebijakan energi dan saluran distribusi ganda untuk para BUMN<sup>103</sup>.

Selama periode pra reformasi ekonomi 1978 sampai akhir 80-an peran pemerintah China sebagai regulator, operator dan distributor begitu kuat. Sesuai dengan asas Partai Komunis yang mengelola seluruh sumber daya alam demi kepentingan rakyat contohnya kebijakan kontrol energi oleh pemerintah. Peran pemerintah China diperlihatkan dengan keberadaan KPN dan posisi kementerian Industri Minyak dan Kementerian Geologi dan Sumber Daya Alam. Pada akhir dekade 80-an terjadi pergeseran signifikan dimana pemerintah China mengambil keputusan untuk menyerahkan hak pengelolaan sektor migas ke tangan BUMN. Pemerintah China melihat dengan memberikan kuasa pengelolaan ke tangan BUMN maka sektor migas dalam negeri akan mengalami peningkatan kuantitas

---

<sup>102</sup> Peter. S Goodman, “*Big Shift in China’s Oil Policy : With Iraq Deal Dissolved by War Beijing Looks Elsewhere*”, diakses [www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article](http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article) , 5/10/2009 13:35

<sup>103</sup> Daniel H Rosen, “*China Energy: A Guide for The Perplexed*”, Peterson Institute for International Economics, 2007 diakses dari [www.iie.com/publications/papers](http://www.iie.com/publications/papers), 21/11/2009, 00:50, hlm 10

dan kualitas. Terjadilah pengurangan peran pemerintah dalam menyusun strategi operasi dan lebih memfokuskan dalam perumusan kebijakan nasional.

### III.1.2 Kebijakan energi 1990-2001

Dekade 90-an ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi China. Sejak 1979-1991 GNP China mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 9,3 % per tahun, saat yang sama pertumbuhan dunia hanya 2,8 % per tahun dan Asia sebesar 5,5 % per tahun<sup>104</sup>. Kemajuan pesat memicu meningkatnya kebutuhan energi terutama minyak dan China memasuki babak baru dengan menjadi negara net importir minyak di tahun 1993. Padahal semenjak tahun 1959-1992 China merupakan negara eksportir minyak walau tidak prioritas utama.

Status yang berubah menjadi negara importir minyak, mendorong China untuk mengeluarkan kebijakan energi baru menggantikan kebijakan *self sufficiency*. Kebijakan energi China pada dekade 90-an memfokuskan pada pemberian kesempatan yang sama untuk eksploitasi dan konservasi energi, meningkatkan struktur konsumsi energi dengan meningkatkan penggunaan minyak dan gas alam, menempatkan batubara sebagai sumber energi primer, rasionalisasi harga produsen dan konsumen serta meningkatkan efisiensi produksi dan penggunaan energi<sup>105</sup>. Pemerintah China mulai melakukan restrukturisasi dan reformasi BUMN energi agar di masa depan mampu menjadi penyuplai handal energi dan memenuhi permintaan energi.

Sejak era Mao Zedong, KPN memegang keputusan final dalam mengatur prioritas untuk pembangunan energi dengan arahan dari *State Council* dan Kongres Rakyat Nasional. Walaupun memiliki otoritas KPN tetap bekerjasama dan dibantu oleh Kementerian Energi, pemerintah provinsi untuk menyusun rencana 5 tahunan yang telah dimulai sejak tahun 1953<sup>106</sup>. Pada perkembangannya

<sup>104</sup> John Bryne, Bo Shen, Xiuguo LI, “*The Challenge of Sustainability : Balancing China’s Energy, Economy and Environmental Goals*”, diakses [www.nrel.gov/international/china/pdfs/challenge\\_of\\_sustainability.pdf](http://www.nrel.gov/international/china/pdfs/challenge_of_sustainability.pdf), p 1, 3/10/2009 01:15

<sup>105</sup> Philip Andrew-Speed, “*China’s Energy Woes: Running on Empty*”, diakses [www.feer.com/articles/1/2005/0506/free/p013.html](http://www.feer.com/articles/1/2005/0506/free/p013.html), 4/10/2009 13:20

<sup>106</sup> James P Dorian, “*Minerals, Energy and Economics Development in China*”, Clarendon Press New York, 1994, hlm 51

perumusan kebijakan energi nasional melibatkan pula BUMN-BUMN, sebagai catatan Kementerian energi sendiri merupakan gabungan dari kementerian industri batubara, kementerian industri nuklir, kementerian sumber daya air dan listrik serta kementerian industri minyak. Kementerian industri minyak pun sebelumnya sebagian fungsinya telah dialihkan ke CNPC.

Dengan semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan energi China dan semakin sering pula terjadi benturan-benturan kepentingan maka perumusan kebijakan menjadi berjalan lambat. Maka pada tahun 1993 seiring dengan status China menjadi negara pengimpor minyak bumi, pemerintah China memutuskan untuk menutup kementerian energi dan menyerahkan kebijakan energi nasional di tangan KPN<sup>107</sup>.

Kebijakan energi 1990-2001 memperlihatkan terjadinya pergeseran tujuan dari fokus pembangunan sektor energi China. Pergeseran terjadi dari tujuan negara yang mengelola sektor migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa melakukan ekspansi atau bekerja sama dengan luar negeri menjadi aktif melakukan kerjasama dengan pihak asing dan berinvestasi ke luar negeri. Pemerintah China pun memutuskan untuk terbuka terhadap modal asing yang masuk dalam sektor energi. Pendorong pergeseran tersebut adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi China dan meningkatnya permintaan energi sehingga China menyandang status negara importir minyak. Patut dicermati adalah proses peralihan kebijakan energi dan reformasi BUMN energi yang berjalan bertahap dan relatif tanpa hambatan, secara umum China tidak mengalami gejolak dalam perekonomian saat China menjadi negara importir migas dan perubahan kebijakan nasional. Padahal dalam periode ini pula China melakukan reformasi birokrasi terutama dalam bidang perekonomian seperti perampingan kementerian yang dirasa tidak maksimal dan membentuk kementerian baru maupun BUMN-BUMN baru seperti *PetroChina*, *China Railway Material*, *Sinochem* dan lain-lain. Namun China mampu melewati *turning point* dalam industri energi yang menjadi penopang perekonomiannya.

---

<sup>107</sup> Celeste Wallander, "China's Energy In The Geopolitical Context", 2007, diakses dari [www.atlanticcommunity.com](http://www.atlanticcommunity.com), 21/11/2009, 00:26, hlm 8



### III.1.3 Kebijakan energi 2001-2007

Semakin meningkatnya permintaan energi mendorong pemerintah China mengeluarkan kebijakan / strategi energi baru yang tertuang dalam *White Paper on National Program on Mineral Resource* pada tahun 2001. Kelima kebijakan adalah ;

1. Investasi besar-besaran di proyek eksplorasi dan pengembangan di berbagai negara
2. Membangun Strategic Petroleum Reserve
3. Meningkatkan kapasitas kilang di dalam negeri untuk mengolah minyak mentah yang diimpor dari Timur Tengah sehingga menekan biaya pengolahan dan tidak perlu membeli minyak olahan.
4. Mengembangkan industri gas alam domestik sebagai sumber energi selain minyak bumi
5. Mengembangkan lapangan minyak dalam negeri dengan mengundang pihak-pihak asing dalam proyek eksplorasi dan pengeboran di China<sup>108</sup>

Dalam *White Paper* yang sama, pemerintah China secara jelas akan menggunakan perusahaan-perusahaan negara / SOE sebagai ujung tombak dalam pencarian minyak di dunia. Pemerintah China menulis bahwa mereka akan mendorong perusahaan-perusahaan nasional untuk ikut serta dalam kerjasama internasional dalam bidang sumber daya mineral dan eksplorasinya, eksploitasi dan penggunaan sumber daya mineral dari luar negeri. Pemerintah China akan mempromosikan dan melindungi investasi dalam sumber daya mineral dan eksploitasi di luar China<sup>109</sup>.

Untuk mengatur kebijakan energi, pemerintah China melakukan reformasi birokrasi dengan membentuk *National Development and Reform Commission* (NDRC) pada tahun 2003 yang memiliki beberapa biro yaitu biro energi yang memutuskan setuju atau tidak suatu proyek energi. Biro harga memiliki kontrol

<sup>108</sup> Dwijaya Kusuma, "*Strategi China untuk mengamankan minyak sebagai sumber energi: Analisa terhadap peran negara dan perusahaan minyak milik negara di China tahun 1990-2005*", Fisip UI, 2006, hlm 35-37

<sup>109</sup> I Wibowo dan Syamsul Hadi, "*Merangkul China*", PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2009, hlm 178

terhadap harga yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan energi seperti bensin, gas, listrik dan lain-lain. Biro konservasi sumber daya energi dan perlindungan lingkungan hidup memiliki tugas mencapai target peningkatan dan efisiensi energi dan biro industri yang membuat kebijakan industri terkait insentif energi<sup>110</sup>. Dengan demikian semua kebijakan energi nasional dan kebijakan MNC seperti PetroChina harus berpedoman kepada kebijakan yang dikeluarkan NDRC.

Sebagai pendukung NDRC maka dibentuk dua lembaga yang bertugas merancang pedoman-pedoman di sektor energi yaitu *State Energy Office* (SEO) dan *Energy Leading Group* (ELG) di tahun 2005. Latar belakang pembentukan kedua lembaga adalah terjadinya krisis energi di tahun 2003/2004 dan menyadarkan para pemimpin China melakukan reformasi institusi dalam birokrasi energi<sup>111</sup>.

Patut diperhatikan adalah kebijakan membangun *Strategi Petroleum Reserve* (SPR), dan untuk mewujudkannya pemerintah China bekerja sama dengan IEA (International Energy Agency). IEA memandang kebijakan SPR perlu bagi negara-negara importir minyak untuk bisa mengendalikan perubahan-perubahan yang terjadi pasar internasional, perubahan seperti harga minyak, jumlah cadangan minyak, politik, ekonomi dan lainnya. Bagi China membuat SPR karena dorongan komitmen untuk dapat menerapkan pertumbuhan ekonomi yang mengacu pada pembatasan konsumsi energi, penurunan polusi dan peningkatan efisiensi. Tujuan jangka pendek adalah penurunan penggunaan energi sebesar 20% dari GDP pada tahun 2020 dan dapat membangun konservasi energi dan efisiensi<sup>112</sup>.

Dari kacamata China, pembangunan SPR diperlukan untuk :

1. Mengurangi ketergantungan terhadap negara Timur Tengah danantisipasi instabilitas di kawasan Timur Tengah dan Afrika, biaya dan kondisi transportasi yang mahal dan tidak aman karena perompakan

<sup>110</sup> Daniel H Rosen, "*China Energy: A Guide for The Perplexed*", Peterson Institute for International Economics, 2007 diakses dari [www.iie.com/publications/papers](http://www.iie.com/publications/papers), 21/11/2009, 00:50, hlm 19

<sup>111</sup> Celeste Wallander, "*China's Energy In The Geopolitical Context*", 2007, diakses dari [www.atlanticcommunity.com](http://www.atlanticcommunity.com), 21/11/2009, 00:26, hlm 9

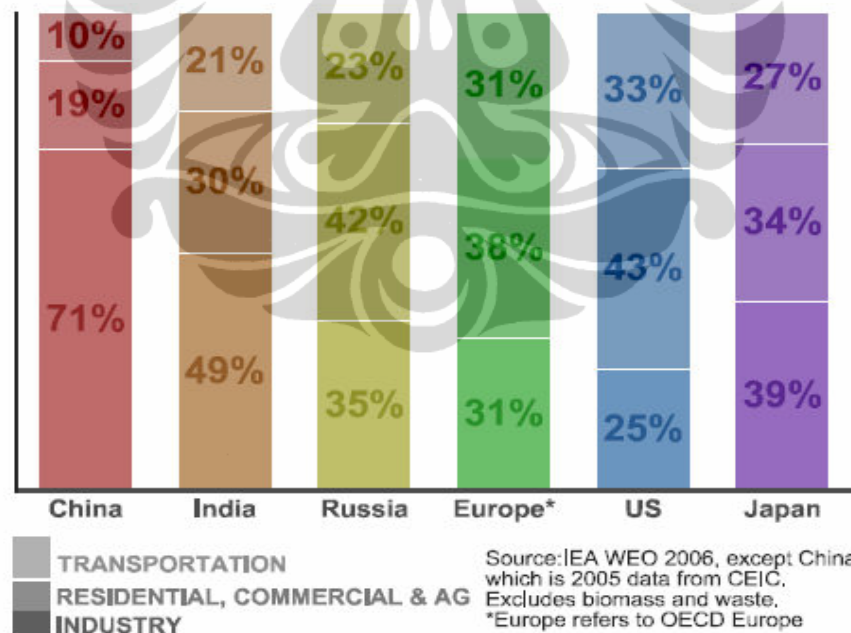
<sup>112</sup> IEA, "*International Energy Outlook 2006*", diakses dari [www.iea.com](http://www.iea.com), 10/10/2009

2. Membantu mengendalikan harga minyak di pasar Internasional
3. Menghalangi / mencegah gangguan akibat instabilitas ekonomi dan politik
4. Meningkatkan peran China di dunia Internasional terutama dalam politik luar negeri China<sup>113</sup>

Kebijakan SPR menjadi fokus pembangunan energi China karena pada tahun 2003/2004, China secara tidak terduga mengalami krisis energi. Krisis energi karena adanya peningkatan permintaan dari sektor rumah tangga yang selama merupakan konsumen ke-2 terbesar setelah sektor industri. Permintaan energi dari sektor industri mencapai 71%, sektor rumah tangga 19% dan transportasi menyumbang 10%. Seperti yang digambarkan dalam grafik di halaman berikutnya;

Grafik 3.1

Permintaan Energi berdasarkan Sektor (2005)



Sumber : [www.iie.com/publications/papers](http://www.iie.com/publications/papers)

<sup>113</sup> Dwijaya Kusuma, "Strategi China untuk mengamankan minyak sebagai sumber energi: Analisa terhadap peran negara dan perusahaan minyak milik negara di China tahun 1990-2005", Fisip UI, 2006, hlm 45

Peningkatan permintaan energi di sektor rumah tangga seiring dengan dengan arus urbanisasi dan modernisasi di kota-kota China. Pada tahun 2004 arus urbanisasi di China mencapai 41,76% dan diperkirakan mencapai 55-60% saat tahun 2020. Arus urbanisasi yang terus meningkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat ditandai dengan kepemilikan rumah dan mobil mendorong permintaan akan energi dari sektor rumah tangga meningkat. Pada tahun 2007 industri otomotif China telah menjual 6,2 juta mobil baru padahal hanya 4% pemilik mobil di China namun peningkatan signifikan adalah jumlah pengguna kendaraan bermotor baik umum dan pribadi yang mencapai 25 juta orang<sup>114</sup>.

Untuk mewujudkan kebijakan SPR maka pemerintah China memerintahkan 3 BUMN yaitu CNOOC, CNPC dan Sinopec untuk membantu pembangunan infrastruktur dan eksplorasi minyak ke seluruh dunia. Ketiga BUMN akan menugaskan anak perusahaannya untuk mencapai target kebijakan SPR, dalam kasus CNPC maka kewajiban tersebut diserahkan ke PetroChina sebagai anak perusahaan CNPC. PetroChina menjadi bagian dari pelaksana kebijakan SPR yang untuk tahap awal ditargetkan di tahun 2008 dapat menyediakan 100 juta barrel dan dibutuhkan dana pembangunan tidak kurang \$ 500 juta di luar biaya operasional dan perawatan cadangan strategis. Pemerintah China memutuskan empat wilayah utama pembangunan SPR yaitu Zhenhai, Daishan, Huangdoan dan Dalian. Fasilitas SPR diharapkan dalam beberapa tahun mendatang kapasitas cadangan minyak bisa bertambah dua kali lipat.

Pemerintah China melakukan langkah-langkah maju dalam kebijakan energinya terutama dalam strategi pemenuhan kebutuhan energi seperti migas dengan mendorong BUMN-BUMN China melakukan investasi di luar negeri serta menjadi aktor utama dalam industri migas internasional. Nilai tambah dari kebijakan 2001 adalah kejelasan strategi jangka panjang China dalam pemenuhan kebutuhan energi seperti minyak dan gas. Pemerintah China mengeluarkan kebijakan SPR, suatu kebijakan yang lazim digunakan negara-negara industri maju dalam meningkatkan perekonomian mereka dengan menjamin ketersediaan energi. Untuk mewujudkan kebijakan SPR pemerintah China bekerja sama

---

<sup>114</sup> Celeste Wallander, "China's Energy In The Geopolitical Context", 2007, diakses dari [www.atlanticcommunity.com](http://www.atlanticcommunity.com), 21/11/2009, 00:26, hlm 5-6

dengan organisasi internasional dan perusahaan energi internasional dalam pembangunan infrastruktur dan operasional saat SPR telah berfungsi.

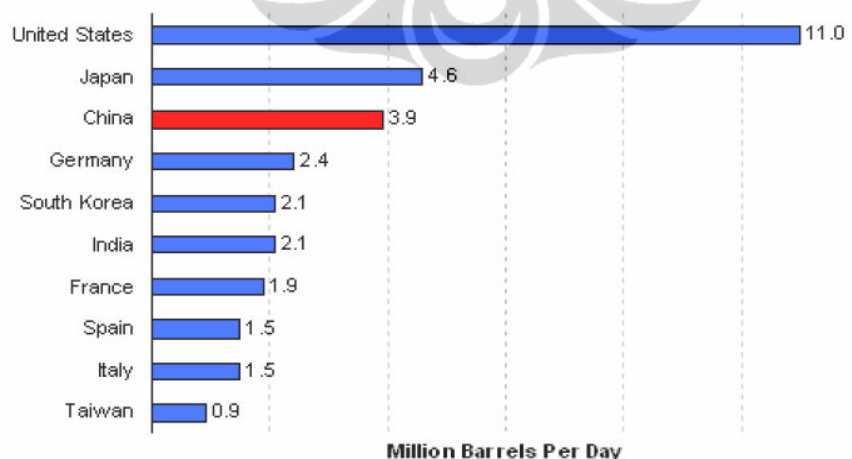
Reformasi birokrasi tetap menjadi salah satu agenda utama, pemerintah China membentuk lembaga baru yang khusus menyusun kebijakan energi China sehingga beban pembuatan kebijakan yang selama ini berada di KPN menjadi lebih ringan. Keputusan pemerintah China dengan meluncurkan SPR, reformasi birokrasi dan mendorong BUMN menjadi pemain utama di dunia memperlihatkan visi mereka tentang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

### III.1.4 Kebijakan energi 2007 dan sekarang

Berdasarkan data dari *Energy Information Administration*, China diperkirakan mengkonsumsi minyak sebanyak 7,8 juta barrel per hari di tahun 2008 dan menjadikan China menjadi negara konsumen minyak terbesar ke-2 setelah Amerika Serikat (AS) Pada tahun yang sama China menghasilkan 4 juta barrel per hari minyak bumi dan membeli 3,9 juta barrel per hari dan menjadikan mereka sebagai negara pengimpor minyak bumi terbesar ke-3 setelah AS dan Jepang<sup>115</sup>. Seperti yang diperlihatkan oleh grafik di bawah :

Grafik 3.2

#### Sepuluh Besar negara importir minyak tahun 2008



Sumber : [www.eia.doe.gov/china.countryanalysisbrief](http://www.eia.doe.gov/china.countryanalysisbrief)

<sup>115</sup> EIA, "Country Analysis Briefs : China", diakses dari [www.eia.doe.gov](http://www.eia.doe.gov) , p 2, 14/10/2009, 14.00

Kenaikan konsumsi minyak bumi oleh China juga diakui oleh pemerintah China, dalam laporannya pemerintah China melaporkan bahwa konsumsi minyak bumi meningkat sebesar 12% di tahun 2008 yaitu 215 juta ton. Menurut Zhu Fang, deputy informasi dan pemasaran *China Petroleum and Chemical Association*, konsumsi minyak bumi meningkat karena meningkatnya impor minyak bumi di kuartal kedua dan ketiga tahun 2008<sup>116</sup>. Peningkatan konsumsi minyak juga diiringi oleh pembentukan lembaga baru yang bertugas pemberian izin usaha energi, menetapkan harga minyak di level pengecer atau retail dan melaksanakan kebijakan energi pemerintah pusat yang dikeluarkan *State Council*, KPN dan *National Development and Reform Commission* (NDRC), lembaga baru ini adalah *National Energy Administration* atau NEA dibentuk pada bulan July 2008.

Pada tahun 2007, untuk menjawab tantangan akan kebutuhan energi yang semakin meningkat, China mengeluarkan "buku putih" tentang kebijakan energi yang berjudul "*China's Energy Conditions and Policies*". Dalam buku putih 2007, China memaparkan secara jelas kondisi dan situasi sumber daya alam (SDA) di China, pemerintah menjelaskan kondisi SDA di China yang termasuk rendah hanya 1/15 dari cadangan dunia dan tersebar di seluruh energi sehingga membutuhkan investasi yang cukup banyak dalam kegiatan eksplorasi dan distribusi energi. Pemerintah China juga menjelaskan adanya hambatan akibat dari ketidakseimbangan produksi, distribusi dan konsumsi sehingga berakibat sulitnya pemerintah mengamankan jumlah suplai minyak bumi secara berkala dan hambatan berikutnya adalah kurang lengkapnya sistem pasar terutama di bidang energi serta belum maksimalnya sistem pengamanan energi di China. Pada *White Paper 2007*, isu lingkungan hidup masuk perhatian pemerintah China karena semakin tergantungnya industri China akan bahan baku batubara yang berakibat terjadi degradasi lingkungan dan menambah tekanan pada pemerintah untuk segera mencari sumber energi yang lain.

Tekanan yang semakin meningkat mendorong pemerintah China mengeluarkan kebijakan dalam pembangunan energi. Tujuan utama dari kebijakan

---

<sup>116</sup> Xinhua, "China oil consumption up 12% in 2008", diakses dari [www.chinadaily.cn.org](http://www.chinadaily.cn.org), 14/10/2009 13:34

energi China pemenuhan kebutuhan dalam negeri China dan terbuka akan investasi dari luar negeri. Pemerintah China menurunkannya dalam enam kebijakan yaitu pertama memprioritaskan pada penghematan energi dengan membuat konservasi SDA. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan energi, China bersandar SDA domestik. Ketiga adalah mendorong penggunaan berbagai macam energi seperti energi listrik, nuklir dan gas. Keempat adalah peningkatan dalam science dan teknologi dalam menghasilkan inovasi dalam bidang energi. Kelima memberikan perlindungan lingkungan dan keenam mendorong kerjasama saling menguntungkan antara perusahaan luar negeri dan dalam negeri<sup>117</sup>.

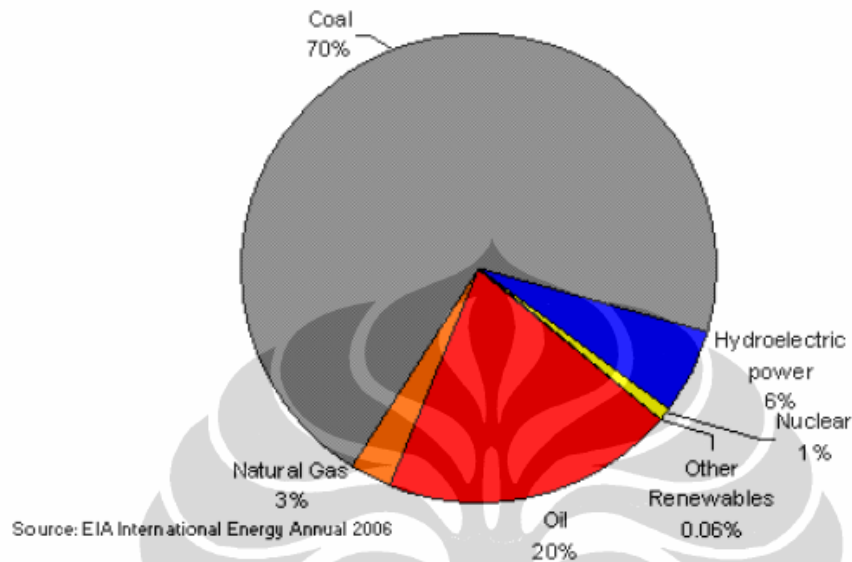
Secara garis besar *White Paper on Energy* tahun 2007 tidak berbeda dengan tahun 2001 namun ada penambahan yang berkaitan dengan energi. Jika di tahun 2001 pemerintah China mendorong peningkatan investasi baik dalam produksi dan distribusi melalui MNC-nya maka tahun 2007 memfokuskan pada pembenahan jalur distribusi dan pemasaran serta masuknya isu lingkungan hidup. Masuknya isu lingkungan hidup disebabkan masih besarnya penggunaan batubara di China sebagai bahan bakar industri yang berimplikasi semakin banyak polusi di lingkungan, oleh karena itu pemerintah China melihat perlunya menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara penggunaan energi dan lingkungan hidup yang bersih dan bebas polusi. Berikut adalah komposisi energi berdasarkan jenis energi ;

---

<sup>117</sup> White paper on Energy, "China's Energy Conditions and Policies", hlm 6-7 diakses dari [www.chinagov.cn](http://www.chinagov.cn) , 18/9/2009 20.00



Grafik 3.3

**Konsumsi total energi di China berdasarkan tipe (2006)**

Sumber : EIA International Energy Annual 2006

Dari data di halaman sebelumnya memperlihatkan batubara masih memegang peranan penting sebesar 70% sedangkan minyak bumi hanya 20%. Oleh karena itu pemerintah China melaksanakan kebijakan diversifikasi energi dan melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri untuk memenuhi kebutuhan energi China.

Kebijakan energi tahun 2007 memiliki hubungan erat dengan kebijakan tahun 2001. Pesan utamanya adalah penegasan peran pemerintah China untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan di tahun 2001 seperti SPR, mendorong BUMN-BUMN untuk lebih agresif dalam bisnis internasional dan reformasi birokrasi. Dua hal penting yang patut dicermati adalah pemerintah China mengeluarkan kebijakan diversifikasi energi dan konservasi energi, kebijakan tersebut mencerminkan masuknya dua isu utama. Pertama adalah isu lingkungan hidup, kedua adalah semakin kuatnya tekanan untuk memenuhi kebutuhan energi di China. Kedua isu tersebut menjadi fokus dari perumusan kebijakan energi tahun 2007.

### III.2 Kebijakan energi di Indonesia

Pada subbagian ini menjelaskan kebijakan energi di Indonesia, latar belakang pemaparan kebijakan energi di Indonesia dengan melihat perubahan Undang-undang (UU) yang berkaitan dengan industri minyak dan gas nasional. UU seperti UU Pertamina tahun 1971, UU Migas tahun 2001 dan UU Penanaman Modal tahun 2007 beserta peraturan yang berkaitan erat dengan investasi perusahaan multinasional di Indonesia seperti PetroChina. Subbagian juga menjelaskan perubahan yang terjadi dalam Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas nasional karena Pertamina merupakan aktor utama dalam industri migas Indonesia.

#### II.2.1 Sistem hukum migas Periode pra UU migas 2001 / UU no 8 1971 tentang perusahaan minyak dan gas negara

Pada tahun 1945 Indonesia merdeka dan memiliki UUD '45 yang mengatur perekonomian Indonesia begitu pula dengan kebijakan migas / energi Indonesia yang terangkum dalam pasal 33 UUD '45. Pasal tersebut menjadi landasan bagi sistem hukum minyak dan gas di Indonesia, maka setiap sumber daya mineral di bawah tanah merupakan milik rakyat Indonesia dan tidak dapat dipindahkan hak kepemilikannya atau diserahkan ke pihak lain sesuai dengan pasal 33 UUD 1945<sup>118</sup>. Bertindak sebagai pemegang hak adalah negara, negara memiliki hak untuk mengelola kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Pada kedua kegiatan negara bisa melakukan kerjasama operasi (*Joint operating contract*) dengan perusahaan swasta melalui perusahaan negara (BUMN). Jenis sistem hukum ini juga diterapkan oleh negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Iran, kedua negara mendapatkan royalti dari hasil eksplorasi dan eksploitasi minyak dan kedua negara memiliki hak penuh kepemilikan atas minyak / sumber daya alam yang ada di bawah tanah negaranya.

<sup>118</sup> Mirza A. Karim dan Karen Mills, "Indonesia Legal Framework In The Oil, Gas and Energy and Mining Sectors; Including Dispute Resolution", Karimsyah Law Firm, 2003, Jakarta, diakses dari [www.arbitralwomen.org](http://www.arbitralwomen.org), 24/10/2009, 11:54, hlm 3

Berbeda dengan Arab Saudi yang telah memiliki perjanjian kerjasama kerajaan dengan pihak swasta di tahun 1933, selama tahun 1945-1960 Indonesia belum mengeluarkan UU migas baru sehingga peraturan migas di Indonesia masih berdasarkan UU kolonial Belanda “*Indische Mijnwet*” amandemen tahun 1928. Dalam “*Indische Mijnwet*” pemerintah Belanda mendorong masuknya investasi swasta ke Indonesia, terdapat beberapa peraturan baru yang masuk antara lain ;

- Masa operasi dikurangi hanya 40 tahun
- Kewajiban pengeboran diperkenalkan
- Memperkenalkan pelepasan hak atas area yang rendah prospek eksplorasi
- Dipekenalkannya royalti negara
- Pembagian laba yang bersifat progresif hingga 20% dari laba bersih perusahaan<sup>119</sup>

Baru pada tahun 1960, DPR-S melalui usulan anggota DPR-S dari Aceh yaitu Teuku Mohammad Hassan untuk merubah peraturan migas yang dirasa menguntungkan para perusahaan asing. Maka UU no 44 / 1960 tentang minyak dan hasil tambang disahkan, UU yang menekankan peningkatan peran negara dan DPR dalam kerjasama kontrak kerjasama (KK). Peningkatan peran negara terlihat pada kewenangan Kementerian pertambangan untuk menunjuk pihak swasta sebagai mitra BUMN. Semua KK harus disahkan oleh hukum dan otoritas tambang hanya di bawah tanah dan bukan permukaan tanah. Implikasinya adalah terjadi nasionalisasi 3 perusahaan besar di Indonesia oleh pemerintah yaitu Caltex, Shell dan Stanvac. Ketiga perusahaan pun melakukan negoisasi ulang dengan pemerintah pada tahun 1963<sup>120</sup>. Pada saat bersamaan pemerintah juga membentuk tiga perusahaan minyak negara yaitu Permina, Pertamina dan Permigan sebagai kepanjangan pemerintah dalam industri minyak dan gas di Indonesia.

Pada tahun 1968, dengan alasan efisiensi Permina digabung dengan perusahaan minyak Pertamina menjadi Pertamina seperti yang kita kenal sampai sekarang. Entitas migas yang perkasa ini dikokohkan peran dan tugasnya dengan

<sup>119</sup> Ooi Jin Bee, “*The Petroleum Resource of Indonesia*”, Oxford University Press, 1982, diakses dari [www.arbitralwomen.org](http://www.arbitralwomen.org), 24/20/2009, 12:00, hlm 3

<sup>120</sup> Ibid, hlm 21

Undang-undang No. 8 tahun 1971 tentang perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau populer dikenal sebagai UU Pertamina<sup>121</sup>.

Perubahan / pergantian pemerintah RI berakibat pada perubahan peraturan terhadap modal asing, pemerintah Orde Baru memiliki kebijakan yang mendorong masuknya investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu perubahan signifikan dalam bisang migas adalah keluarnya UU no.8 / 1971 tentang Pertamina menggantikan UU no.44 / 1960. UU Pertamina menegaskan peran Pertamina sebagai BUMN yang mengelola usaha migas di Indonesia dan wakil pemerintah untuk mengeluarkan perijinan atau KK tanpa harus melalui DPR dan hanya Pertamina yang bisa mengeluarkan ijin KK. Pertamina menjalankan peran dwifungsi yaitu peran bisnis dan regulator, model ini terbukti ampuh dan membuat Pertamina menjadi BUMN Super. Motor penggerak dari keberhasilan ini adalah para Kontraktor Asing yang bekerja atas dasar Kontrak Karya (KK) Migas dan Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan Pertamina. Mereka mengelola hampr 90% produksi minyak mentah Indonesia. Dalam konteks ini Pertamina berperan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dan Negara dalam mengelola serta mengawasi kegiatan kontraktor asing tersebut<sup>122</sup>.

Pertamina juga berperan sebagai distributor di tingkat retail / eceran atau memiliki kewajiban publik (*Public Service Obligation / PSO*). Berdasarkan UU no. 8/1971, tata niaga migas diubah di mana Pertamina secara monopoli ditugaskan untuk menyediakan dan melayani kebutuhan BBM dalam negeri yang pelaksanaannya diatur oleh pemerintah. Sejalan dengan meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional dan melonjaknya konsumsi dalam negeri maka Pertamina mulai mengimpor minyak. Sementara itu sejak anggaran tahun 1977/1978, sebelum pemilu, pemerintah mulai memberikan subsidi harga BBM<sup>123</sup>.

Peran distributor di tingkat retail juga dilengkapi dengan peran sebagai pengawas. Dari peran sebagai pengawas Pertamina mendapatkan *retention fee*

---

<sup>121</sup> Baihaki Hakim, "The Lone Ranger, Lekak-liku Transformasi Pertamina", Kata Hastaka Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 4

<sup>122</sup> Ibid, hlm 7

<sup>123</sup> Ibid, hlm 155-156

dari pemerintah yang nilainya secara bisnis lebih rendah daripada pendapatan yang diperoleh dari kerjasama KK maupun KBH.

Pada kegiatan *upstream* (hulu) Pemerintah melalui Pertamina menerapkan kebijakan kerjasama “*Production Sharing Contract*”(PSC) selain bentuk KK dengan pihak swasta. Namun peraturan pemerintah yang mengatur PSC baru dikeluarkan tahun 1994 yaitu PP no.35 / 1994 yang menekankan pada ;

- Manajemen PSC di tangan Pertamina
- Kontraktor menyediakan pendanaan, teknologi dan sumber daya manusia
- Resiko finansial ditanggung oleh kontraktor
- Hasil produksi disalurkan Antar kontraktor dan Pertamina berdasarkan persentase yang ditetapkan oleh pemerintah setelah perhitungan dan pengembalian biaya produksi
- Kontraktor membayar semua pajak
- Rencana pembangunan dan anggaran harus disetujui oleh Pertamina
- Semua properti dan peralatan menjadi milik Pertamina
- PSC merupakan subjek hukum Indonesia
- Kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik
- PSC secara otomatis berhenti jika migas tidak ditemukan dalam bentuk yang cukup dari sisi komersial selama 10 tahun<sup>124</sup>

Isi UU Pertamina memperkokoh peran Pertamina sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh dalam perijinan dan kegiatan produksi dan distribusi ke masyarakat. Pada masa berlakunya UU ini, Indonesia melalui Pertamina menikmati keuntungan dari terjadinya Oil Boom di dekade 70-an.

Jika kita runutkan kebijakan energi Indonesia masa sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan dan berlakunya UU Pertamina maka kita bisa melihat

<sup>124</sup> Mirza A. Karim dan Karen Mills, “*Indonesia Legal Framework In The Oil, Gas and Energy and Mining Sectors; Including Dispute Resolution*”, Karimsyah Law Firm, 2003, Jakarta, diakses dari [www.arbitralwomen.org](http://www.arbitralwomen.org), 24/10/2009, 11:54, hlm 13-14

pergeseran signifikan dari peran pemerintah Indonesia. Dimana pada masa kolonial peran pemerintah tidak begitu kuat, kondisi sebaliknya terjadi saat berlakunya UU no.44 /1960 tentang migas dan pertambangan. Peran negara sebagai pihak yang berwenang mengelola minyak gas dan hasil tambang lainnya, kuatnya peran negara juga didorong oleh situasi politik dalam negeri dimana timbulnya paham anti bantuan asing. Puncaknya adalah terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing termasuk perusahaan minyak internasional seperti Caltex, Shell dan Stanvac dan lahirnya 3 BUMN migas yaitu Pertamina, Permindo dan Perminan. Dalam perkembangannya ketiga BUMN melebur menjadi Pertamina sebagai satu-satunya BUMN yang bertanggung jawab di industri migas nasional.

Pergantian kepemimpinan nasional di akhir dekade 60-an memberikan perubahan dalam tata kelola sektor migas Indonesia. Pemerintahan Orde Baru memiliki kebijakan yang terbuka terhadap investasi dan bantuan asing. Pergeseran peran pemerintah pun terjadi, dengan menunjukan Pertamina sebagai entitas tunggal tata kelola migas nasional. Pertamina berperan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dan Negara dalam mengelola serta mengawasi kegiatan kontraktor asing. Sebenarnya peran dwifungsi telah dilakukan oleh Pertamina semenjak pemerintahan Orde Lama sehingga tidak ada perubahan signifikan dari Pertamina walaupun terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Pemerintahan Orde Baru memperkuat peran dwifungsi Pertamina melalui UU. No 8 / 1971 tentang Pertamina. Di satu sisi peran Pertamina semakin kuat bahkan menjadi BUMN super, dan menjadi contoh pengelolaan BUMN energi bagi negara-negara eksportir minyak karena Pertamina bisa beroperasi layak MNC energi terkemuka di dunia. Salah satu kebijakan Pertamina yang menjadi pedoman bagi BUMN dari negara lain adalah mekanisme Kontrak Karya (KK) dan Kontrak Bagi Hasil (KBH). Dari kacamata pemerintah, perannya menjadi menurun karena sebagian dari hak dan kewajiban pemerintah berdasarkan UUD'45 yaitu merumuskan kebijakan energi nasional diserahkan kepada Pertamina.



Implikasi dari pergeseran peran pemerintah dan BUMN (Pertamina) adalah terjadi ketidakjelasan dalam tujuan kebijakan energi nasional dan tidak efektif dan efisiennya kinerja Pertamina sebagai suatu perusahaan. Ketidakjelasan terlihat dimana pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan PSO dan *security of supply* tanpa memberikan pedoman jelas penerapan kebijakan dan mengandalkan Pertamina sebagai pembuat solusi masalah migas nasional. Dari kacamata Pertamina terjadi kondisi yang membuat perusahaan menjadi BUMN Super dan ikut mengembangkan usahanya ke bidang-bidang yang bukan termasuk dalam bisnis inti sehingga laba yang dihasilkan tidak menjadi modal untuk berinvestasi namun menjadi modal bagi bisnis-bisnis non inti seperti pembentukan Patra Jasa, Pelita Air Service dan lain-lain.

### III.2.2 Periode UU migas no.22 / 2001

Substansi UU no.8 / 1971 dan PP no.35 / 1994 yang menempatkan pemerintah dan Pertamina sebagai pihak satu-satunya yang berwenang dalam industri migas di Indonesia menyebabkan industri migas Indonesia berjalan tidak efisien dan efektif. Sebagai perbandingan Petronas mampu memproduksi sebesar 33% dari minyak Malaysia sementara Pertamina yang memiliki ladang minyak lebih banyak hanya mampu memproduksi 7,2% dari minyak Indonesia, ini menandakan bahwa Petronas bekerja lebih efisien dan efektif<sup>125</sup>.

Akumulasi permasalahan dalam Pertamina dan terjadinya perubahan politik nasional dan berlakunya otonomi daerah mendorong pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan UU migas baru yang menjadi landasan kebijakan energi Indonesia. UU no.22 / 2001 disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada tanggal 23 November 2001 yang memindahkan peran Pertamina sebagai pemegang otoritas industri migas ke tangan pemerintah yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Undang-undang migas tahun 2001 menjelaskan kegiatan produksi *upstream* (hulu) yaitu eksplorasi dan eksploitasi dan kegiatan *downstream* (hilir).

<sup>125</sup> Mark Newbery, "New Indonesian Oil and Gas Law", Journal of Energy and Natural Resource, vol 20, no.4, 2002

Pemerintah mempunyai fungsi sebagai pengawas di kedua kegiatan produksi, wakil pemerintah dalam kegiatan *upstream* adalah BP Migas dan untuk kegiatan *downstream* adalah BPH Migas. UU ini menjadi dasar pembentukan kedua badan sebagai wakil pemerintah dan badan pengatur produksi minyak dan gas di Indonesia mengganti peran Pertamina.

Menurut Baihaki Hakim ada 3 faktor pemicu perubahan mendasar di Pertamina dan sektor migas di Indonesia

1. Adanya momentum perubahan politik setelah tumbanganya Orde Baru sebagai akibat entakan krisis moneter tahun 1997 dan kemelut politik pasca kerusuhan Mei 1998
2. Krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang terjadi pada Juni-Juli 2000
3. Munculnya UU migas no. 22 tahun 2001<sup>126</sup>

Berdasarkan UU no.22/2001 peran pengawas dan PSO pun dikembalikan ke pemerintah melalui badan pengawas dan pengatur maka secara otomatis hak Pertamina mendapatkan *retention fee* menjadi hilang dan kewajiban PSO tidak lagi menjadi monopoli Pertamina. Implikasi positif dari hilangnya hak dan kewajiban Pertamina adalah dari sisi pemerintah, hilangnya *retention fee* menambah penerimaan migas sehingga berdampak positif bagi APBN dan tidak ada monopoli PSO oleh Pertamina maka perusahaan bisa memfokuskan dalam pengembangan usaha terutama di kegiatan hulu.

Pemerintah melalui UU migas yang baru meluncurkan kebijakan deregulasi sektor migas dan demonopoli pemasaran BBM. Dari sudut pandang operator migas nasional seperti Pertamina, kebijakan ini mendorong perusahaan migas nasional melakukan reformasi perusahaan agar lebih efektif dan efisien dan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan multinasional. Kebijakan deregulasi dan demonopoli membuka kesempatan bagi Pertamina untuk memilih investasi dengan nilai yang lebih besar ketimbang menambah investasi BBM yang tidak menguntungkan<sup>127</sup>. Sementara dari sudut pandang perusahaan internasional

<sup>126</sup> Baihaki Hakim, "The Lone Ranger, Lekak-liku Transformasi Pertamina", Kata Hastaka Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 13-14

<sup>127</sup>Ibid, hlm 25

seperti PetroChina adalah kemudahan akses untuk perusahaan berinvestasi di industri migas nasional. Beralihnya pemegang otoritas dari Pertamina ke Pemerintah melalui BP Migas dan BPH Migas mendorong efektivitas investasi dan pemasaran migas di Indonesia dan proses menjadi lebih cepat dan mudah.

Reformasi kebijakan energi melalui deregulasi dan demonopoli terlihat dimana Pertamina tidak lagi memiliki kewajiban PSO dari pemerintah, dan pemegang kewajiban PSO terbuka untuk perusahaan siapa saja dengan melalui proses tender oleh BPH Migas. Kewajiban PSO sendiri dari kaca mata Pertamina sungguh berat dan tidak sepadan dengan nilai *retention fee* yang dibayarkan dan tugas yang bersifat PSO menyita fokus perusahaan sehingga energi perusahaan tergerus oleh hal-hal yang bukanlah porsi perusahaan seperti penegakkan hukum. Dari sisi pemerintah dengan hilangnya *retention fee* maka beban pengeluaran pemerintah melalui APBN menjadi lebih ringan<sup>128</sup>.

Reformasi kebijakan migas nasional mendorong solusi bagi permasalahan yang ditimbulkan penerapan UU Pertamina terdahulu. Solusi terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan kegiatan hulu (produksi) dan hilir (distribusi dan pembelian). Kebijakan di bidang hulu adalah kilang-kilang minyak dibebaskan untuk mengolah minyak sesuai dengan konfigurasi kilang untuk mengoptimalkan margin dan harga LNG Indonesia tidak dikaitkan dengan harga ekspor minyak mentah Indonesia<sup>129</sup>. Solusi ini untuk memecahkan masalah turunnya produksi minyak mentah Indonesia karena kilang-kilang minyak dipaksa untuk mengolah jenis minyak yang tidak sesuai dengan jenis kilang minyak. Kebijakan ini juga menghapus kebijakan *security of supply* yang semasa berlakunya UU Pertamina diterapkan, implikasi dari kebijakan ini adalah kilang-kilang minyak dipaksa untuk beroperasi 100% dan jika mereka mengalami perawatan rutin maka ketersediaan minyak di Indonesia akan terpengaruhi.

Kebijakan baru di bidang hilir adalah pembelian minyak mentah dari luar negeri, Pertamina akan memperbesar porsi pengadaan jangka panjang (*long-term contract*) dengan membeli langsung ke produsen minyak mentah tanpa melalui

---

<sup>128</sup>Ibid, hlm 23

<sup>129</sup>Ibid, hlm 77

*traders*<sup>130</sup>. *Long-term contract* menggantikan pola pembelian dengan pola *spot*, pembelian berdasarkan *spot* yang relatif tinggi dibandingkan dengan kontrak berjangka membuat Pertamina menjadi sangat rentan terhadap aksi spekulasi di pasar internasional. Perbaikan di sarana *trading*, organisasi dan pemanfaatan trading arm anak perusahaan Petral secara optimal, meningkatkan fasilitas dermaga dan armada angkutan untuk mendukung impor dengan basis *free on board* (FOB) dengan mengurangi biaya yang tidak perlu.

Reformasi 1998 menjadi momentum perubahan di semua sektor termasuk sektor industri migas yang selama pemerintah Orde Baru menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Reformasi dalam sektor migas nasional ditandai dengan pergeseran peran pemerintah, jika selama pemerintahan Orde Baru peran pemerintah lemah karena hak tata kelola migas nasional berada di Pertamina maka pasca reformasi peran pemerintah menjadi lebih kuat. Revitalisasi peran pemerintah diwujudkan melalui UU no.22/2001 tentang migas yang menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memegang hak sebagai regulator dan pengawas melalui badan pemerintah yaitu BP Migas. Implikasi bagi Pertamina adalah deregulasi dan demonopoli Pertamina di sektor hulu dan hilir, Pertamina hanya bergerak sebagai operator dan tidak lagi menjadi regulator dan pengawas. Pertamina juga tidak akan dibebankan oleh kewajiban publik (PSO) karena kewenangan penunjukkan PSO berada di tangan pemerintah melalui BP Migas. Dengan begitu Pertamina bisa meningkatkan kinerja perusahaan secara efektif dan efisien serta berfungsi lazimnya suatu perusahaan minyak dan gas.

Penguatan peran pemerintah, deregulasi dan demonopoli Pertamina menciptakan peluang bagi para perusahaan multinasional untuk masuk ke dalam kegiatan hulu dan hilir. Berlakunya UU migas tahun 2001 menarik pemain-pemain baru di industri migas nasional yang berasal dari China yaitu PetroChina, CNOOC dan Sinopec yang bergerak di sektor upstream. Sementara di sektor hilir / retail, Pertamina tidak lagi sendiri dengan masuknya Shell, Petronas dan Total Indonesia sebagai operator di pasar retail. Berkaitan dengan sektor hilir dan tidak diwajibkannya Pertamina sebagai operator PSO maka kewajiban PSO menjadi

---

<sup>130</sup>Ibid, hlm 78

terbuka bagi setiap perusahaan minyak dan gas baik nasional dan internasional. Kebijakan tersebut merupakan kesempatan bagi setiap perusahaan minyak dan gas untuk masuk ke dalam sektor hilir.

Kebijakan energi melalui UU migas 2001 membuka kesempatan dan memberikan kepercayaan kepada perusahaan migas internasional seperti PetroChina untuk masuk ke industri migas nasional dan bergerak di kegiatan hulu dan hilir. Walaupun sampai saat ini PetroChina belum memutuskan masuk ke sektor hilir. Kegiatan PetroChina di upstream dengan Pertamina, Pertamina dipilih karena kemampuan dan kinerja Pertamina yang lebih baik semenjak deregulasi dan demonopoli Pertamina. Kerjasama yang diterapkan dalam *Joint Operation Body* (JOB) di blok Tuban dan blok Salawati.

### **III.2.3 UU no.25 / tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Selain UU migas nasional, perusahaan energi internasional seperti PetroChina diatur pula oleh UU penanaman modal. UU ini menjadi faktor penentu bagi perusahaan internasional dalam berinvestasi di Indonesia karena memberikan aturan-aturan dan tata kelola investasi yang jelas di Indonesia. Pada tahun 2002 saat PetroChina masuk ke dalam sektor migas nasional, investasi PetroChina masuk berdasarkan UU no.1 / 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam perkembangannya UU PMA tidak mampu memenuhi kebutuhan penanaman modal asing oleh karena itu di tahun 2007 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU baru tentang Penanaman Modal. Undang-undang yang memberikan kemudahan bagi para modal asing untuk datang ke Indonesia seperti PetroChina. Kemudahan yang dimiliki tertulis di pasal 22 dan 23 dalam bab fasilitas penanaman modal. Pertama ialah pasal 22 ayat 2 yang mengatur kebijakan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah yang dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanaman modal berupa;

- a) Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun.

- b) Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbarui selama 30 tahun; dan
- c) Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun<sup>131</sup>.

Berdasarkan pasal 22 ayat 2 maka perusahaan multinasional seperti PetroChina memiliki kemudahan dalam mendapatkan fasilitas, yaitu hak atas guna usaha, guna bangunan dan pakai atas tanah yang selama 90-70 tahun. Jangka waktu yang lama dan memberikan kepastian bagi perusahaan seperti PetroChina perihal kepastian lama perusahaan melakukan usahanya di Indonesia.

Kebijakan yang memepermudah penanaman modal juga terlihat dalam pasal 23 ayat 1, 2 dan 3 tentang kemudahan fasilitas imigrasi. Dimana pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bisa memberikan rekomendasi pemberian kemudahan fasilitas imigrasi bagi perusahaan multinasional. Pasal 23 juga mengatur pemberian izin tinggal bagi penanam modal asing;

- a. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun.
- b. Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- c. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan.
- d. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun

<sup>131</sup> UU no. 25 tahun 2007, diakses [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id), 20/11/2009, 23:16



diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan

- e. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan<sup>132</sup>.

Pasal 23 merupakan bentuk kebijakan deregulasi keimigrasian yang dikeluarkan untuk mendorong investasi asing di Indonesia. Kedua pasal ini menunjukkan pula peran pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengalihkan modalnya ke Indonesia, dengan menciptakan peluang bisnis bagi para perusahaan multinasional.

Jika kita buat rangkuman tentang UU no.25/2007 tentang Penanaman Modal dari kedua pasal 22 dan 23 maka substansi dari UU ini adalah peran pemerintah untuk membuka kesempatan bagi perusahaan asing dalam hal ini perusahaan energi internasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jangka waktu yang mencapai 95 tahun untuk berinvestasi menandakan bahwa pemerintah Indonesia berusaha menarik investasi yang bersifat jangka panjang seperti investasi di sektor migas. Kemudahan untuk menanam modalnya juga didukung oleh adanya deregulasi imigrasi untuk perusahaan internasional, terutama bagi tenaga ahli yang berasal dari luar negeri dengan rekomendasi BKPM.

### **III.3 Indonesia-China Energy Forum (ICEF)**

#### **III.3.1 ICEF ke-1 dan ICEF ke-2**

Indonesia-China Energy Forum (ICEF) pertama kali diselenggarakan pada tanggal 25-27 September 2002 di Bali. Ide pembentukan ICEF dicetuskan dalam kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke China di bulan Maret 2002, tujuan pembentukan ICEF adalah membangun hubungan yang lebih erat antara Indonesia dan China dalam kerjasama energi. Pembentukan ICEF didorong oleh

---

<sup>132</sup> UU no. 25 tahun 2007, diakses [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id), 20/11/2009, 23:16, hlm 18

permintaan energi yang semakin meningkat dari China dan pendekatan oleh Indonesia dalam proyek pengadaan gas alam untuk provinsi Guangdong dan Fujian<sup>133</sup>.

ICEF ke-1 menghasilkan 6 *Memorandum of Understanding* (MoU) antara 6 perusahaan yang bernilai ratusan juta dollar dalam kerjasama sektor migas, pertambangan dan kelistrikan. MoU yang disetujui antara lain kerjasama pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 65 MegaWatt (MW) di Palembang, Sumatera Selatan. PLN akan bekerja sama dengan *China National Chemical* dan *China ChengDa Chemical Eng* dalam proses pembangunan. PLN juga bekerja sama dengan *China National Machinery & Equipment Import and Export* untuk membangun pembangkit tenaga listrik bertenaga batubara di Labuhan Angin, Sumatera Utara yang bernilai \$ 447 juta dan bekerjasama dengan *China Machine Buliding International* untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik batubara di Parit Baru, Kalimantan Barat. Pembangkit listrik memiliki daya 100 MW dan senilai \$ 246 juta.

MoU di sektor migas dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan CNOOC dalam pembangunan jaringan pipa gas yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Jawa Timur, proyek pipanisasi yang senilai \$ 1,7 milyar. Sementara Sinopec melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal Indonesia yaitu PT. Chaya Putra Kencana untuk membeli saham kepemilikan blok Basilan dan Batumandi, Diski. Bidang pertambangan PT. Bukit Asam bekerja sama dengan *China National Technical* untuk membangun pertambangan batubara tertutup di Ombilin, Sumatera Barat.

Pertemuan ICEF ke-2 diselenggarakan pada tanggal 27-29 Oktober 2006 di Shanghai, China. Pada ICEF ke-2 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Perdana Menteri Huang Ju menyaksikan penandatanganan 6 proyek energi senilai \$ 5 milyar. Keenam proyek tersebut adalah kerjasama pembangunan pabrik kimia berbasis batubara di Sulawesi Selatan antara PT. Sumber Gas Sakti Prima

<sup>133</sup> [www.gasandoil.com/goc/company/cns24281.htm](http://www.gasandoil.com/goc/company/cns24281.htm), "Indonesia and Chinese firms sign major energy deals", volume 7, issue #20 - Tuesday, October 15, 2002, diakses 3/1/2010 jam 13.32

dan *ChengDa Engineering Corp.* Pembangunan pertambangan besi dan baja di Tanjung Genting, Sukabumi oleh PT. Ciracap Sumber Prima dan *China Yunnan Geology and Resource* yang senilai \$ 300 juta. Kerjasama pembangunan pembangkit listrik di Jeneponto, Sulawesi Selatan antara PT. Bosowa Energi dan *Chengda Energy Corp* senilai \$ 170 juta.

Indonesia melalui PT. Antarniaga Nusantara bekerja sama dengan *Yunnan Chemical Industry Group* dan *China National Chemical Engineering* akan membangun proyek batubara dan kimia di provinsi Yunnan, kerjasama ini bernilai \$ 1 milyar dan merupakan investasi energi pertama dari Indonesia dalam kerangka ICEF. Kerjasama terakhir adalah pembangunan pembangkit listrik di Bangko Tengah, Sumatera Selatan oleh PLN, PGN, PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan *China Huadian Corp*, kerjasama ini bernilai \$ 2,1 milyar<sup>134</sup>.

### III.3.2 ICEF ke-3

Forum ICEF ke-3 diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2008 di Jakarta. ICEF ke-3 dihadiri oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla dan Wakil Perdana Menteri RRC Mr. Li Keqiang, pertemuan ICEF ke-3 mengagendakan tiga tema utama yaitu minyak dan gas bumi, listrik dan batubara dan energi terbarukan sebagai tema baru. ICEF ke-3 menghasilkan 8 perjanjian kerjasama antara lain MoU antara BP Migas dan CNOOC tentang pengelolaan blok migas di Selat Madura yang senilai \$ 642 juta. ICEF ke-3 menghasilkan pula 2 kerangka kerja tentang pembayaran kredit untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan bakar batubara di Pelabuhan Ratu dan Cilacap antara PLN dan *Exim Bank of China* senilai \$ 775 juta. Perjanjian pembelian listrik untuk pembangkit listrik batubara di Muara Enim, Sumatera Selatan, pembelian batubara untuk pembangkit listrik di Cilacap. Kerjasama joint venture antara PT. Bukit Asam dengan *China Huadian Corp* tentang pengembangan tambang batubara di Danko Tengah, Sumatera Selatan, proyek yang bernilai \$ 14 juta<sup>135</sup>.

<sup>134</sup> [www.zoomchina.com.cn/new/content/view/17172/81/](http://www.zoomchina.com.cn/new/content/view/17172/81/), "Indonesia, China sign \$ 4,26 b power, coal investment deal", diakses 3/1/2010, jam 13.32

<sup>135</sup> <http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/2170-pemerintah-indonesia-dan-china-tandatangani-kontrak-kerjasama-bidang-energi.html>, diakses 3/1/2010, jam 13.32

Masuknya isu lingkungan hidup dalam kebijakan energi China mendorong pertemuan ICEF membahas kerjasama energi terbarukan. ICEF ke-3 menghasilkan 2 perjanjian kerjasama energi terbarukan yaitu kerjasama pembangunan pabrik biodiesel dan agribisnis antara PT. Kurnia Selaras dan *China Development Bank* yang dilakukan di Jambi dan Sumatera Selatan, proyek bernilai \$ 255 juta. Kerjasama kedua antara PT. Bumi Dharma Kencana dan *Lark Guangdong Power Resource Inc* yang dilakukan di Kalimantan Timur, yang bernilai \$ 350 juta.

ICEF ke-3 juga memperlihatkan keseriusan China untuk meningkatkan kerjasama energi dengan Indonesia. Bentuk keseriusan terlihat dengan kedatangan Wakil Perdana Menteri Li Keqiang ke Indonesia dengan tujuan meyakinkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dalam bentuk kerjasama jangka panjang. Li Keqiang mendorong Indonesia untuk bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan teknologi energi terutama energi terbarukan. Hal paling penting dalam ICEF ke-3 keinginan China untuk membuat strategi energi yang terintegrasi antara kedua negara terutama dalam mekanisme pengembangan energi serta mengajak Indonesia untuk ikut berinvestasi bersama di negara-negara ketiga dalam bidang energi. Terutama dalam isu pengelolaan blok migas di Laut China Selatan, China melalui Li Keqiang mengajak Indonesia untuk membangun kerjasama energi dalam pengelolaan migas di Laut China Selatan<sup>136</sup>.

Dari pemaparan tentang ICEF ke-1, 2 dan ke-3 terlihat peran negara dalam membuka jalan bagi kerjasama antara MNC begitu penting. Pada konteks ICEF peran pemerintah baik *home* dan *host country* dilakukan dalam instrumen kerjasama bilateral berupa forum kerjasama. Suatu forum yang menghasilkan kebijakan FDI, perdagangan dan makroekonomi. Keberadaan ICEF memperlihatkan bahwa pemikiran Dicken bahwa salah satu perubahan dalam aktivitas industri berasal dari peran pemerintah (*nation-state*) terbukti dalam hubungan China dan Indonesia. Begitu pula dengan pemikiran Ravi Ramamurti bahwa hubungan *home* dan *host country* berada dalam Tier-1 yang terangkum

<sup>136</sup> <http://english.sina.com/china/2008/1224/206984.html>, "China Proposes measures for strengthening energy cooperation with Indonesia", diakses 2/1/2010, jam 13.32

dalam kerjasama ICEF. Kedua negara melakukan negoisasi yang hasilnya menentukan negoisasi antara MNC dengan *host country*. Pemikiran Ramamurti dalam konteks PetroChina terlihat dalam pelaksanaan ICEF ke-1 di tahun 2002, Indonesia dan China membentuk dasar dari kerjasama ICEF yang bersamaan dengan masuknya PetroChina dalam industri migas nasional dengan mengakuisisi Devon Energy. Kebijakan yang dihasilkan oleh ICEF telah mendorong PetroChina melakukan ekspansi usaha ke Indonesia dan tanpa kebijakan tersebut hambatan-hambatan akan investasi akan menghadang PetroChina seperti yang dihadapi mereka dalam perluasan pengelolaan di blok Jabung dan Tuban.

